



PERUBAHAN RENCANA
STRATEGIS (**RENSTRA**)
BADAN KEUANGAN
2021-2026

**BADAN KEUANGAN
KABUPATEN NGAWI**

Jalan Teuku Umar No. 12 Kode Pos 63211
Telp/Fax (0351) 749152, Email :
badankeuangan@ngawikab.go.id



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 56 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NGAWI NOMOR 130 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
PADA BADAN KEUANGAN KABUPATEN NGAWI
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi yang berdampak pada penyesuaian struktur organisasi Perangkat Daerah dan perubahan pohon kinerja Perangkat Daerah serta penyesuaian kegiatan/subkegiatan beserta indikator kinerja dan targetnya, maka Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 perlu ditinjau kembali untuk diadakan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ngawi Nomor 130 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah bebrap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6081);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

24. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
31. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);

32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 10);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ngawi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 19);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 8);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 9);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 1);
38. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 130 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 130);
39. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan . : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NGAWI NOMOR 130 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PADA BADAN KEUANGAN KABUPATEN NGAWI TAHUN 2021-2026.

Pasal I

Lampiran dalam Peraturan Bupati Ngawi Nomor 130 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 130) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 9 Februari 2022

BUPATI NGAWI,

ONY ANWAR HARSONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 9 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2022 NOMOR 56

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah-Nya Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan Kabupaten Ngawi Tahun 2021- 2026 dapat diselesaikan dengan baik sesuai Peraturan Perundang-undangan. Penyusunan Renstra sebagai panduan dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta dukungan terhadap capaian tujuan pembangunan Daerah untuk 5 (lima) tahun ke depan.

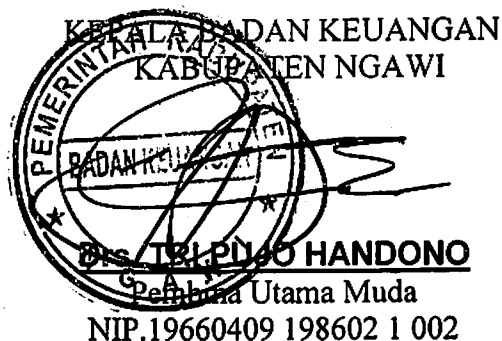
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, mengamanatkan mekanisme, cara, dan metode dalam penyusunan dokumen Renstra bagi Perangkat Daerah. Badan Keuangan berkewajiban untuk menyusun Renstra yang selaras dengan dokumen yang lebih tinggi dan merumuskan program kegiatan yang progresif menjawab permasalahan yang ada.

Kami menyadari penyusunan Renstra ini menemui berbagai kendala namun dapat diatasi dengan baik karena Renstra ini disusun secara partisipatif melibatkan seluruh unsur baik pimpinan maupun staf lingkup Badan Keuangan dan berkoordinasi dengan pihak-pihak eksternal terkait.

Renstra ini akan menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Badan Keuangan tahun 2021-2026, sehingga semua komponen harus berkomitmen mewujudkan tercapainya Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah yang mengacu tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026.

Demikian semoga bermanfaat.

Ngawi, Pebruari 2022


Drs. **TRIPUDO HANDONO**
Pejabat Utama Muda
NIP.19660409 198602 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud Dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II	11
GAMBARAN PELAYANAN OPD	11
2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi OPD	11
2.2 Sumber Daya OPD	18
2.3. Kinerja Pelayanan OPD	25
2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD	48
BAB III	51
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	51
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD	51
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	52
3.3. Telaahan Renstra K/L Dan Renstra	54
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	55
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	56
BAB IV	58
TUJUAN DAN SASARAN	58
4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah OPD	58
BAB V	60
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	60
5.1 Strategi Dan Kebijakan OPD	60

BAB VI	66
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	66
BAB VII.....	133
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	133
BAB VIII.....	135
PENUTUP.....	135
8.1. Kaidah Pelaksanaan	135
8.2. Rencana Tindak Lanjut	136

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Arsitektur Dokumen Perencanaan Daerah.....	1
Gambar 2 SOTK Badan Keuangan	13

DAFTAR TABEL

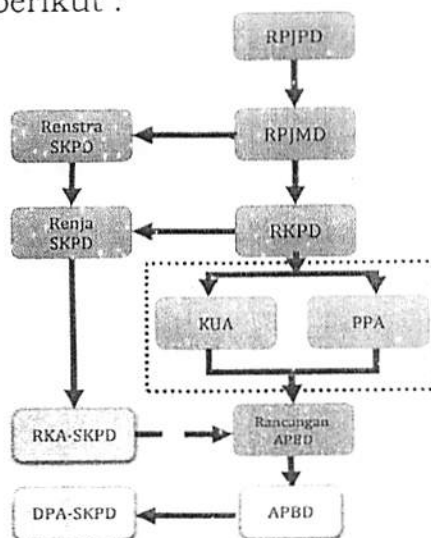
Tabel 1	: Komposisi Pegawai Menurut Jabatan.....	18
Tabel 2	: Komposisi Pegawai Menurut Pangkat/Golongan.....	19
Tabel 3	: Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional.....	19
Tabel 4	: Jumlah Pegawai Menurut Gender.....	20
Tabel 5	: Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan.....	20
Tabel 6	: Sumber Daya Aset OPD.....	23
Tabel 7	: Capaian IKU 2016-2020.....	26
Tabel 8	: Target dan Realisasi Pendapatan.....	26
Tabel 9	: Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah.....	27
Tabel 10	: Proyeksi Pendapatan 5 (lima) Tahun	27
Tabel 11	: Penetapan APBD.....	27
Tabel 12	: Penetapan Pertanggung jawaban APBD.....	27
Tabel 13	: Data Sertifikasi Aset Tanah.....	28
Tabel 14	: Tabel T-C.23.....	29
Tabel 15	: Tabel T-C.24.....	32
Tabel 16	: Tabel.T-B.35. Identifikasi Permasalahan	52
Tabel 17	: Penjabaran Visi Misi RPJMD.....	53
Tabel 18	: Tujuan dan Sasaran Renstra.....	54
Tabel 19	: Tabel T-C.25.....	59
Tabel 20	: Tabel T-C.26.....	61
Tabel 21	: Tabel T-C.27.....	67
Tabel 22	: Tabel T-C.28.....	134

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI NGAWI
 NOMOR 56 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI NGAWI NOMOR 130 TAHUN 2021
 TENTANG RENCANA STRATEGIS
 PERANGKAT DAERAH PADA BADAN
 KEUANGAN KAB. NGAWI TAHUN
 2021-2026

BAB I
 PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengan Dalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Mempedomani Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Keterkaitan antar dokumen perencanaan dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 1. Arsitektur Dokumen Perencanaan Daerah

1. RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 tahun yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan daerah dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan. RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program Kepala daerah yang memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program dalam rencana kerja yang bersifat indikatif. Pada Satuan Kerja, RPJMD ini selanjutnya disebut dengan Rencana Strategis SKPD atau lebih dikenal dengan Renstra-SKPD yaitu dokumen perencanaan jangka menengah 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Rencana pembangunan 5 tahunan ini selanjutnya dijabarkan lagi dalam rencana pembangunan tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja .Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 tahun. Renja SKPD yang disusun dengan mengacu pada Renstra dan pagu indikatif selanjutnya menjadi pedoman penyusunan RKA SKPD. RKA inilah yang menjadi muara dari dokumen perencanaan dan penganggaran. Selanjutnya RKA SKPD ini akan menjadi dasar ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Anggaran yaitu DPA. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pada Pasal 113 ayat (1), mengamanatkan bahwa Rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (5) disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala BAPPEDA untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Badan Keuangan Kabupaten Ngawi sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan sebagian kewenangan Bupati memiliki berbagai macam program kegiatan dalam rangka mensukseskan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati dalam urusan Keuangan, meliputi; Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang tertuang dalam Perda Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Ngawi Nomor 5 Tahun

2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Tipe A.

Rencana Strategis disusun sebagai instrumen untuk lebih memberi arah tujuan, sasaran organisasi yang akan dicapai dan bagaimana cara mencapainya. Perencanaan strategis merupakan awal dari akuntabilitas suatu lembaga kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, proses penyusunan rencana strategis memerlukan keterlibatan dari berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Renstrajuga merupakan penjabaran atas gambaran permasalahan yang dihadapi serta indikasi program kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan secara terencana, sistematis dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan tantangan yang ada.

Dinamika pada Perangkat Daerah baik itu secara Regulasi maupun tugas pokok dan fungsi baik mengharuskan dilakukannya perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Latar belakang perubahan Rencana Strategis Badan Keuangan yaitu :

1. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah ditindaklanjuti dengan perubahan pohon kinerja Perangkat Daerah hasil asistensi oleh Kementerian PAN-RB yang mempengaruhi perubahan kegiatan/sub kegiatan beserta indikator kinerja dan targetnya pada Renstra PD;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Tipe A;
4. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/14/404.101.2/B/2022 tentang Penetapan Pejabat Fungsional yang Diberikan Tugas Tambahan sebagai Sub Koordinator pada Perangkat Daerah;
5. Perkembangan permasalahan, kondisi dan isu strategis pada Perangkat Daerah yang menyebabkan penambahan kegiatan/sub kegiatan baru dan indikator kinerja baru.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Keuangan Kabupaten Ngawi adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
11. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
13. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
14. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
23. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 284); 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi I-9 Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 284); 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi I-9 Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi;
33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019- 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 94);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 10); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2012 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ngawi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 19);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ngawi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 19);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 8);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 9).
39. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 28 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ngawi;
40. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Tipe A.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

- Memberikan arah, pedoman yang terencana dalam mengarahkan seluruh potensi sumber daya manusia
- Memberikan arah, pedoman yang terencana dalam mengarahkan potensi lain yang dimiliki dalam rangka mewujudkan visi, misi serta strategi yang mampu menjawab tantangan, kemajuan perkembangan.
- Mempermudah pengendalian dan pengawasan dalam program kegiatan

1.3.2 Tujuan

- Memberikan gambaran potensi riil yang dimiliki, melalui faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan

- Menetapkan program dan sasaran kerja yang terarah, terukur yang akan dijadikan pedoman pada masa lima tahun
- Memprediksi hambatan-hambatan yang mungkin terjadi dan sekaligus mencari jalan keluar (solusi)
- Memberikan arah dalam upaya menjalin hubungan & komunikasi dengan berbagai pihak.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Strategis Badan Keuangan Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

BAB. I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB. II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB. III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB. IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

BAB. V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB. VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB. VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB. VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN OPD

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI OPD

2.1.1. Kedudukan

Badan Keuangan Kabupaten Ngawi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah. Badan Keuangandipimpin oleh Kepala dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2.1.2 Tugas, Fungsi

Sesuai Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 Badan Keuangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati. Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Badan Keuangan mempunyai kewenangan :

- a. penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah;
- b. penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah;
- c. penyusunan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- d. penyusunan rencana dan melaksanakan kebijakan penganggaran Pemerintah Daerah;
- e. penyusunan Ranperda dan Ranperbup tentang RAPBD dan PAPBD;
- f. penyusunan dan melaksanakan Kebijakan penatausahaan APBD;
- g. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD);
- h. penyusunan dan melaksanakan kebijakan Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD;
- i. penyusunan Laporan Keuangan Daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- j. penyusunan Ranperda dan Ranperbup Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- k. penyusunan Laporan semester I dan Prognosis 6 bulan berikutnya;

- l. melaksanakan Pemungutan pendapatan daerah dari sektor pajak dan mengkoordinasikan dan fasilitasi pendapatan daerah;
- m. melaksanakan koordinasi, pembinaan, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan APBD;
- n. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola / menatausahakan investasi daerah;
- o. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
- p. melakukan penagihan piutang daerah;
- q. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- r. penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan barang milik daerah daerah;
- s. penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- t. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan tentang pengelolaan barang milik daerah;
- u. penyusunan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
- v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

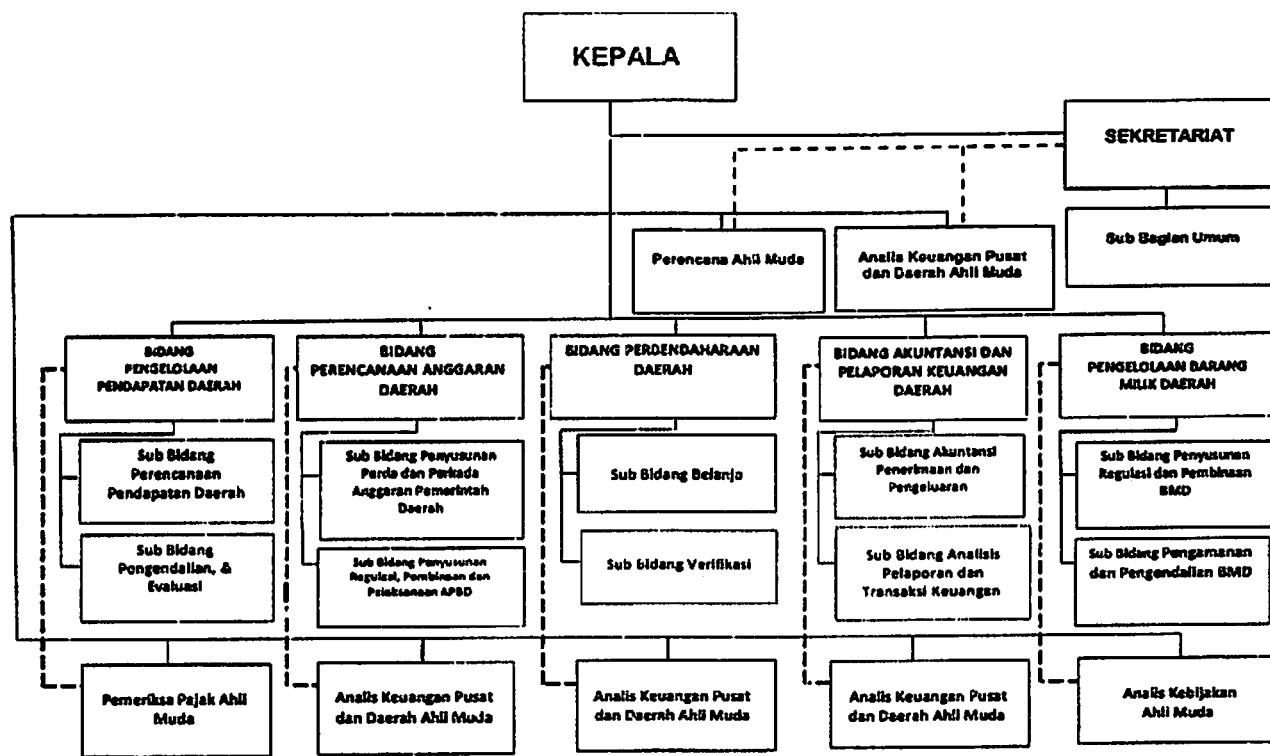
2.1.3 Struktur Organisasi

(1) Susunan Organisasi Badan Keuangan terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- d. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah;
- e. Bidang Perbendaharaan Daerah;
- f. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;
- g. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- h. Kelompok jabatan fungsional.

(2) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h masing-masing dipimpin oleh Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Untuk lebih jelasnya struktur organisasi Badan Keuangan dapat dilihat pada :



Gambar 2. Struktur Organisasi Badan Keuangan

Uraian tugas dari masing-masing struktur Badan Keuangan digambarkan sebagai berikut :

a. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan dan umum serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis;
- b. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan perangkat daerah;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah dan ppkd;
- d. Pengelolaan administrasi surat menyurat, kearsipan, dokumentasi dan rumah tangga;
- e. Pengelolaan barang dan jasa inventaris;
- f. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan peningkatan kapasitas kepegawaian perangkat daerah;
- g. Pengkoordinasian tugas-tugas teknis bidang;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas kinerja sesuai program dan kegiatan perangkat daerah dan ppkd; dan

- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Keuangan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan Regulasi serta kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- b. Melaksanakan analisa dan pengembangan pajak daerah;
- c. Melaksanakan Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah;
- d. Melaksanakan Penetapan Pajak Daerah;
- e. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah;
- f. Melaksanakan monitoring dan sinkronisasi regulasi yang terkait dengan pendapatan daerah;
- g. Melaksanakan penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah kepada masyarakat;
- h. Melaksanakan perumusan kebijakan pajak daerah;
- i. Melaksanakan sistem informasi pajak daerah;
- j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pendapatan daerah.
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah

Bidang Perencanaan Anggaran Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Keuangan di bidang Penyusunan Perencanaan Anggaran Daerah serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan Anggaran Daerah mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan Regulasi serta kebijakan anggaran Pemerintah Daerah;
- b. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan KUA PPAS dan KUPA PPAS Perubahan;

- c. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, PAPBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD, PAPBD;
 - d. Melaksanakan koordinasi, penyusunan dan verifikasi RKA SKPD, DPA dan DPPA SKPD;
 - e. Melaksanakan koordinasi perencanaan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah;
 - f. Melaksanakan pembinaan perencanaan penganggaran daerah;
 - g. Melaksanakan Analisis perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Daerah;
 - h. Melaksanakan Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi;
 - i. Melaksanakan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan;
 - j. Melaksanakan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak;
 - k. Melaksanakan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten;
 - l. Melaksanakan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya
- d. Bidang Perbendaharaan Daerah

Bidang Perbendaharaan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Keuangan di bidang perbendaharaan daerahserta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Perbendaharaan daerah mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan Regulasi serta kebijakan perbendaharaan Daerah
- b. Mengoordinasikan pengelolaan kas daerah;
- c. Melaksanakan koordinasi pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya;
- a. Penyiapan dan penerbitan anggaran kas Pemerintah Daerah, SPD dan SP2D serta penerbitan SKPP;
- b. Menyiapkan dokumen pengesahan penerimaan dan pengeluaran yang tidak melalui RKUD;
- c. Melaksanakan Penatausahaan Pembiayaan Daerah;

- d. Melaksanakan Koordinasi, Monitoring Dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan Dan Dana Transfer Lainnya;
 - e. Melaksanakan Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama Dan Pemantauan Transaksi Non Tunai Dengan Lembaga Keuangan Bank Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank;
 - f. Melaksanakan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);
 - g. Melaksanakan Koordinasi Pelaksanaan Piutang Dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas;
 - h. Melaksanakan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pematangan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait;
 - i. Melaksanakan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten;
 - j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Badan Keuangan sesuai dengan bidang tugasnya.
- e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
- Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Keuangan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah mempunyai fungsi :
- a. Melaksanakan penyusunan regulasi akuntansi pemerintah daerah;
 - b. Melaksanakan Koordinasi Dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten;
 - c. Melaksanakan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah;

- d. Melaksanakan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban;
 - e. Melaksanakan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran;
 - f. Melaksanakan Konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
 - g. Melaksanakan pencatatan penerimaan dan pengeluaran yang tidak melalui RKUD;
 - h. Melaksanakan Koordinasi, Sinkronisasi Dan Penyelesaian Tuntutan Perberdaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah;
 - i. Melaksanakan Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
 - j. Melaksanakan penyusunan ikhtisar laporan keuangan BUMD;
 - k. Melaksanakan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten;
 - l. Melaksanakan verifikasi dan pengujian atas bukti memorial;
 - m. Melaksanakan rekonsiliasi realisasi penerimaan dan pengeluaran;
 - n. Menyusun dan menyempurnakan konsep naskah dinas yang terkait dengan bidang Akuntansi dan Pelaporan;
 - o. Melaksanakan evaluasi Laporan Realisasi APBD;
 - p. Melaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Badan Keuangan sesuai dengan bidang tugasnya.
- f. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Keuangan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
- b. Melaksanakan penatausahaan barang milik daerah;
- c. Melaksanakan koordinasi inventarisasi barang milik daerah Pemerintah Daerah;

- d. Melaksanakan penyusunan standar harga;
- e. Melaksanakan penyusunan standar kebutuhan barang milik daerah;
- f. Melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah;
- g. Melaksanakan rekonsiliasi laporan barang milik daerah Pemerintah Daerah;
- h. Melaksanakan penyusunan laporan barang milik daerah Pemerintah Daerah;
- i. Melaksanakan penyusunan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah;
- j. Melaksanakan koordinasi dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah;
- k. Mengoordinasikan hasil penilaian barang milik daerah;
- l. Melaksanakan koordinasi penyimpanan dokumen kepemilikan asset pemerintah daerah;
- m. Mengoordinasikan dan Melaksanakan pembinaan pengelolaan barang milik daerah kabupaten;
- n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Keuangan sesuai bidang tugasnya.

2.2 SUMBER DAYA OPD

a. Sumber Daya Manusia

Badan Keuangan didukung sejumlah 78 pegawai (data per 31 Desember 2021), sebagai tenaga penunjang operasional sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dengan rincian dan tingkatan sebagaimana dalam tabel berikut :

❖ Komposisi Berdasarkan Jabatan

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	JUMLAH
1.	Kepala Badan	14	1 Orang
2.	Sekretaris Badan	12	1 Orang
3.	Kepala Bidang	11	5 Orang
4.	Kepala Sub Bagian	9	1 Orang

5.	Kepala Sub Bidang	8	20 Orang
6.	Bendahara	7	1 Orang
7.	Pengelola/Pengolah	6	35 Orang
8.	Pengadministrasi	5	11 Orang
	JUMLAH		76 Orang

Tabel. 1. Komposisi Pegawai Menurut Jabatan

❖ Jumlah Pegawai menurut Pangkat/Golongan

NO	PANGKAT/GOL	JUMLAH
1.	Pembina Utama Muda / IVc	1 Orang
2.	Pembina Tk. I / IVb	1 Orang
3.	Pembina / IVa	9 Orang
4.	Penata Tk. I / III d	10 Orang
5.	Penata / IIIc	10 Orang
6.	Penata Muda Tk. I / III b	8 Orang
7.	Penata Muda / III a	7 Orang
8.	Pengatur Tk.I/ II d	17 Orang
9.	Pengatur/IIc	12 Orang
10.	Pengatur Muda Tk. I/II b	1 Orang
11.	Pengatur Muda/ II a	0 Orang
	JUMLAH	76 Orang

Tabel.2. Jumlah Pegawai Menurut Pangkat/Golongan

❖ Jumlah Pejabat Struktural / Fungsional &Pelaksana

NO	ESELON	JUMLAH
1.	Eselon II	1 Orang
2.	Eselon III	7 Orang
3.	Eselon IV	21 Orang

4.	Pelaksana	47 Orang
	JUMLAH	76 Orang

Tabel.3. Jumlah Pejabat Struktural / Fungsional & Staf

❖ Jumlah Pegawai menurut keberpihakan Pengarusutamaan Gender (PUG)

No.	Eselon/ Fungsional	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Eselon II	1	0	1 Orang
2.	Eselon III	3	4	7 Orang
3.	Eselon IV	10	11	21 Orang
4.	Staf	34	13	47 Orang
	JUMLAH	48	26	76 Orang

Tabel. 4. Jumlah Pegawai menurut keberpihakan Pengarusutamaan Gender (PUG)

❖ Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	Pasca Sarjana/ Strata 2	17 Orang
2.	Sarjana/ Strata 1	18 Orang
3.	Ahli Madya D3	7 Orang
4.	SMA	34 Orang
5.	SMP	-
	JUMLAH	76 Orang

Tabel.5. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Peta Jabatan sebagai gambaran kebutuhan pegawai dimasa sekarang dan masa mendatang sebagai berikut :

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH KEBUTUHAN (berdasar	JUMLAH KONDISI SEKARANG
1	Kepala Badan Keuangan	1	1
2	Sekretaris	1	1
3	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	1	1
4	Penyusun Laporan Keuangan	1	0

5	Bendahara	2	2
6	Pengelola Keuangan	6	2
7	Perencana Ahli Muda	1	1
8	Analisis Perencanaan Penganggaran	1	0
9	Pengelola Bahan Perencanaan	2	1
10	Kepala Sub Bagian Umum	1	1
11	Analisis Kepegawaian	1	0
12	Pengadministrasi Umum	5	3
13	Arsiparis	1	0
14	Pengelola Surat	2	1
15	Pengelola Kepegawaian	2	1
16	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik	2	0
17	Kabid Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	1
18	Kasubbid Pengamanan dan	1	1
19	Analisis Klasifikasi Barang	1	0
20	Pengolah Data	2	1
21	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	2	1
22	Pengelola Dokumentasi	1	0
23	Kasubbid penyusunan Regulasi dan	1	1
24	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	1	0
25	Pengelola Pemegang Ijin Penyewa Tanah	2	0
26	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	2	1
27	Analisis Kebijakan Ahli Muda	1	1
28	Analisis Aset Daerah	1	0
29	Pengolah Data Rekonsiliasi	2	0
30	Pengolah Data Kebijakan Klasifikasi Barang	1	1
31	Kepala Bidang Akuntansi & Pelaporan	1	1
32	Kasubbid Akuntansi Penerimaan dan	1	1
33	Analisis Pelaporan dan Transaksi Keuangan	1	0
34	Pengolah Data Sistem Akuntansi	1	0
35	Pengelola Akuntansi	1	1
36	Kasubbid analisis Pelaporan & Transaksi	1	1
37	Penyusun Laporan Keuangan	1	0
38	Pengelola Laporan Keuangan Daerah	1	1
39	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli	1	1
40	Analisis Pelaporan dan Transaksi Keuangan	1	0
41	Pengelola Akuntansi	1	1
42	Pengadministrasi Penerimaan	1	1
43	Pengolah Data Sistem Akuntansi	1	0
44	Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah	1	1
45	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli	1	1
46	Penyusun Laporan Keuangan	3	0
47	Pengolah Data Laporan Kas	1	1
48	Pengelola Data Transaksi	3	1
49	Pengadministrasi Penerimaan	1	0

50	Kasubbid Verifikasi	1	1
51	Penyusun Laporan Keuangan	3	2
52	Pengelola Gaji	4	0
53	Pengadministras iKeuangan	2	1
54	Kasubbid Belanja	1	1
55	Analisis Pelaporan Dan Transaksi	3	0
56	Pengelola Data Pencairan Dana	4	0
57	Pengadministrasi Keuangan	1	1
58	Kabid Pengelolaan Pendapatan Daerah	1	1
59	Kasubbid Pengendalian&Evaluasi	1	1
60	Analisis Perencanaan,EvaluasidanPelaporan	3	0
61	Pengadministrasi Keuangan	2	2
62	Pengelola Data danPotensiPajak	1	1
63	Analisis Monitoring, EvaluasidanPelaporan	2	0
64	Pengelola Data dan Informasi Perpajakan	2	1
65	Pengelola Data dan Dokumen Perpajakan	2	0
66	Kasubbid Penetapan dan Penagihan	1	1
67	Analisis pengembangan Potensi Daerah	3	0
68	Pengelola Data dan Potensi Pajak	3	0
69	Pengadministrasi Keuangan	2	1
70	Analisis Penagihan	2	0
71	Pengolah Data PenagihPajak	2	0
72	Pengadministrasi Pajak	6	1
73	Kabid Perencanaan Anggaran Daerah	1	1
74	Kasubbid Pembinaan Dan	1	1
75	Penyusun APBD	2	0
76	Pengelola Anggaran	2	0
77	Kasubbid Penyusunan Perda dan Perkada	1	1
78	Penyusun APBD	2	0
79	PengelolaAnggaran	3	1
80	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah ahli	1	1
81	Penyusun APBD	2	0
82	Pengelola Anggaran	2	0

Peta jabatan tersebut selanjutnya akan dimasukkan kedalam e-formasi sehingga diharapkan dapat dilakukan perekrutan pegawai guna menunjang kinerja badan keuangan khususnya

b. Sumber Daya Aset

Sumber Daya Aset berupa sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan yang secara rinci tertuang dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) Badan Keuangan, namun untuk mendapatkan gambaran Sumber Daya Aset yang di Badan Keuangan dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH (Unit)	KET
1	TANAH BANGUNAN KANTOR	1	
2	A.C. SPLIT	40	
3	ALAT PEMOTONG KERTAS	1	
4	ALAT PENGHANCUR KERTAS	4	
5	AMPLIFIER	1	
6	BRANDKAS	2	
7	BUFFET KAYU	2	
8	CAMERA ELECTRONIC	3	
9	CAMERA VIDEO	6	
10	CCTV - CAMERA CONTROL TELEVISION SYSTEM	1	
11	COMPACT DISC PLAYER	2	
12	CPU (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER)	17	
13	DISPENSER	7	
14	DISPLAY	1	
15	KIPAS ANGIN	9	
16	AUTO SWITCH/DATA SWITCH	3	
17	ACCES POINT	6	
18	PORTABLE ROUTER	2	
19	KABEL UTP	5	
20	UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY (UPS)	16	
21	ANTENE SHF TRANSPORTABLE	2	
22	DATA PATCH PANEL	1	
23	SWITCH	2	
24	MAINFRAME (KOMPUTER JARINGAN)	7	
25	ROUTER	8	
26	LCD PROJECTOR/INFOCUS	11	
27	HUB	3	

28	SCANNER (PERALATAN MINI KOMPUTER)	2
29	ABAKUS (ALAT HITUNG)	3
30	P.C UNIT	77
31	SERVER	12
32	EXHAUSE FAN	4
33	FACSIMILE	1
34	FILING CABINET BESI	26
35	FILING CABINET KAYU	2
36	FILM PROJECTOR	1
37	HANDY CAM	2
38	HANDY TALKY (HT)	2
39	HARD DISK	6
40	KURSI BESI/METAL	130
41	KURSI HADAP DEPAN MEJA KERJA PEJABAT ESELON IV	2
42	KURSI KERJA PEGAWAI NON STRUKTURAL	30
43	KURSI KERJA PEJABAT ESELON II	1
44	KURSI KERJA PEJABAT ESELON III	5
45	KURSI KERJA PEJABAT ESELON IV	7
46	KURSI PUTAR	27
47	KURSI TAMU	17
48	LAP TOP	27
49	LEMARI BESI/METAL	3
50	LEMARI BUKU UNTUK PERPUSTAKAAN	8
51	LEMARI ES	2
52	LEMARI MAKAN	1
53	MEJA KERJA KAYU	57
54	MEJA KERJA PEJABAT ESELON II	1
55	MEJA KERJA PEJABAT ESELON III	1
56	MEJA RAPAT	3
57	MEJA TELEPON	1
58	MESIN ABSEN (TIME RECORDER)	1
59	MICROPHONE	2
60	MONITOR	7
61	NOTE BOOK	26

62	PAPAN BERGERAK	2	
63	PAPAN NAMA INSTANSI	1	
64	PAPAN PENGUMUMAN	1	
65	PERFORATOR BESAR	3	
66	PRINTER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER)	113	
67	RAK BESI	12	
68	RAK SERVER	2	
69	SCANNER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER)	4	
70	SCANNER (UNIVERSAL TESTER)	2	
71	SEPEDA MOTOR	33	
72	SOFA	12	
73	SOUND SYSTEM	4	
74	STATION WAGON	7	
75	TELEPHONE (PABX)	1	
76	TELEVISI	4	
77	UNIT POWER SUPPLY	3	
78	WHITE BOARD	13	
79	WIRELESS	2	
80	BANGUNAN GEDUNG KANTOR SEMI PERMANEN	5	PAPAN REKLAME
81	RUMAH NEGARA GOLONGAN II TIPE A PERMANEN	1	GUDANG
JUMLAH TOTAL		885	

Tabel.6. Sumber Daya Aset (Data Aset per. 2020)

2.3. KINERJA PELAYANAN OPD

Kinerja merupakan hasil yang dapat dicapai oleh organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai tujuan yang dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang dapat diukur dalam periode waktu tertentu. Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Keuangan berdasarkan tugas dan fungsinya adalah :

1. Persentase Pengelolaan Keuangan Kategori Baik

- ✓ Persentase Penyusunan Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah, Kategori Baik

- ✓ Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah, Kategori Baik
- ✓ Persentase ketepatan waktu realisasi anggaran SKPD
- ✓ Persentase Dokumen penyusunan anggaran APBD yang disusun sesuai regulasi dan tepat waktu
- ✓ Persentase dokumen laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun sesuai SAP dan tepat waktu

2. Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Tertib Dalam Penatausahaan, Pemanfaatan Dan Pengawasan Kategori Baik

- ✓ Persentase tingkat Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Tertib dalam Penatausahaan, Penggunaan & Pemanfaatan serta Pengawasan, Pengamanan, Kategori Baik

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Keuangan adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Pengelolaan Keuangan Kategori Baik	84%	85%	88%	90%	97%	98%
2	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Tertib Dalam Penatausahaan, Pemanfaatan Dan Pengawasan Kategori Baik	84%	85%	84%	94%	98%	99%

Tabel.7. Capaian IKU 2016-2021

Tolak ukur Pencapaian Indikator Kinerja Utama tersebut dapat dilihat dari Indikator pada masing-masing kegiatan yaitu antara lain:

1. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah yang meningkat tiap tahunnya;

NO	URAIAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2017	1.967.303.167.805,24	1.996.633.707.315,46	101,49
2	2018	1.990.841.443.197,85	2.078.139.645.055,79	104,38
3	2019	2.182.371.005.038,63	2.202.023.202.926,80	100,90
4	2020	2.080.394.828.837,26	2.129.605.045.925,80	102,37
5	2021	2.177.721.382.647,00	2.226.087.473.199,80	102,22
6	2022	2.137.771.216.831,00	1.310.934.900.710,00	61,32

Tabel.8. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

NO	URAIAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2017	177.609.167.047,24	197.957.917.532,63	111,46
2	2018	204.844.385.276,60	223.871.715.022,26	109,29
3	2019	230.928.018.267,51	255.080.331.088,80	110,46
4	2020	232.017.239.267,26	269.979.788.588,80	116,36
5	2021	287.590.074.591,00	283.608.932.666,80	98,62
6	2022	249.891.880.892,00	188.227.109.341,00	75,32

Tabel.9. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah

KODE REK	URAIAN	PROYEKSI				
		2022 (Rp.)	2023 (Rp.)	2024 (Rp.)	2025 (Rp.)	2026 (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
4	PENDAPATAN DAERAH	2.118.399.570.568,39	2.128.651.217.945,32	2.138.469.853.793,91	2.148.965.791.899,43	2.159.932.422.163,53
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	250.583.326.351,39	260.834.973.728,32	270.653.609.576,91	281.149.547.682,43	292.116.177.946,53
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.793.040.684.217,00	1.793.040.684.217,00	1.793.040.684.217,00	1.793.040.684.217,00	1.793.040.684.217,00
4.3	LAIN2 PENDPTN. DAERAH YG SAH	74.775.560.000,00	74.775.560.000,00	74.775.560.000,00	74.775.560.000,00	74.775.560.000,00

Tabel.10. Proyeksi 5 (lima) Tahun Kedepan

2. Penetapan APBD dan Perubahan APBD Tepat Waktu;

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI	KET
1	2017	31 Desember 2016	29 Desember 2016	TEPAT WAKTU
2	2018	31 Desember 2017	22 Desember 2017	TEPAT WAKTU
3	2019	31 Desember 2018	26 Desember 2018	TEPAT WAKTU
4	2020	31 Desember 2019	18 Desember 2019	TEPAT WAKTU
5	2021	31 Desember 2020	21 Desember 2020	TEPAT WAKTU
6	2022	31 Desember 2021	28 Desember 2021	TEPAT WAKTU

Tabel.11. Penetapan APBD

3. Penetapan Pertanggungjawaban Pelaporan APBD Kabupaten Ngawi Tepat Waktu;

NO	URAIAN	TARGET Perda/Perbup	REALISASI	KET
1	2017	31 Agustus 2018	14 Agustus 2018	TEPAT WAKTU
2	2018	31 Agustus 2019	25 Juli 2019	TEPAT WAKTU
3	2019	31 Agustus 2020	12 Agustus 2020	TEPAT WAKTU
4	2020	31 Agustus 2021	18 Agustus 2021	TEPAT WAKTU
5	2021	31 Agustus 2022	26 Juli 2022	TEPAT WAKTU

Tabel.12. Penetapan Pertanggungjawaban Pelaporan APBD 2017-2021

4. Terlaksananya Penyusunan Regulasi terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Terlaksananya penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) paling lama 2 hari terhitung mulai Surat Perintah Membayar diterima. Jumlah SP2D semakin menurun berarti perencanaan OPD semakin baik dan efisien, sisa belanja semakin menurun berarti silpa semakin menurun tiap tahunnya;
6. Terlaksananya Penyampaian Laporan Keuangan Keuangan Pemerintah Daerah yang tepat waktu kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK - RI) sehingga diperoleh Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 7 (kali) berturut-turut Tahun 2012-2021;
7. Terlaksananya penyampaian usulan RKBMD yang tepat waktu;
8. Terwujudnya pelaksanaan Sertifikat Tanah Pemerintah Kabupaten Ngawi secara intensif, jumlah asset tanah bersertifikat diupayakan meningkat tiap tahunnya;

NO	URAIAN	JUMLAH BIDANG TANAH	JUMLAH TANAH BERSERTIFIKAT	JUMLAH TANAH BELUM BERSERTIFIKAT
1	2017	587	294	293
2	2018	673	312	361
3	2019	941	331	354
4	2020	1031	354	677
5	2021	1031	364	667
6	2022	1050	958	481

Tabel.13. Data Sertifikasi Tanah

Berikut Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Kabupaten Ngawi dapat dilihat pada Tabel T-C.23 dan T-C.24 berikut :

Tabel T-C.23

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan
Kabupaten Ngawi**

No	Indikator	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan, Kategori Baik			100%	100%	100%	100%	100%	86%	86.50%	88%	94%	96%	86%	87%	88%	94%	96%
		-	Persentase Penyusunan Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah, Kategori Baik	100%	100%	100%	100%	100%	86%	88%	88%	94%	97%	86%	88%	88%	94%	97%

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		-	Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah, Kategori Baik	100%	100%	100%	100%	100%	86%	86%	88%	94%	93%	86%	86%	88%	94%	93%
		-	Persentase Dokumen penyusunan anggaran APBD yang disusun sesuai regulasi dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	86%	86%	88%	94%	95%	86%	86%	88%	94%	95%
		-	Prosentase ketepatan waktu realisasi anggaran SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	86%	86%	88%	94%	97%	86%	86%	88%	94%	97%
		-	Persentase dokumen laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun sesuai SAP dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	86%	87%	87%	94%	97.52%	86%	87%	87%	94%	98%

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	Persentase tingkat Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Tertib dalam Penatausahaan, Penggunaan & Pemanfaatan serta Pengawasan, Pengamanan, Kategori Baik	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	80%	81.05%	83.70%	97.01%	90.00%	80%	81%	84%	97%	90%
		-	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah, Kategori Tertib	100%	100%	100%	100%	100%	80%	81.05%	83.70%	97.01%	90.00%	80%	81%	84%	97%	90%

Tabel T-C.24

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN BADAN KEUANGAN KABUPATEN NGAWI

NO	URAIAN	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata2 Pertumbuhan 2019-2020	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran 2020	Realisasi 2020
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Thn 2016	Thn 2017	Thn 2018	Thn 2019	Thn 2020		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	URUSAN WAJIB																	
2	FUNGSI PENUNJANG KEUANGAN	12,760,879,180	15,226,473,921	14,373,032,300	15,059,142,900	13,170,897,532	11,101,964,886	13,176,702,494	12,461,798,277	13,568,700,335	12,489,738,432	0.87	0.87	0.87	0.90	0.95	(0.13)	(0.08)
3	Program pelayanan administrasi perkantoran	2,576,179,380	2,041,744,470	2,719,116,600	3,279,180,300	2,724,802,000	1,050,538,142	1,844,408,279	1,868,988,228	3,024,408,735	2,571,686,261	0.41	0.90	0.69	0.92	0.94	(0.17)	(0.15)
4	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,660,000	3,700,000	21,175,000	8,600,000	1,900,000	1,332,260	2,029,355	6,328,000	2,372,500	1,813,000	0.50	0.55	0.30	0.27	0.95	(0.78)	(0.24)
5	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	169,200,000	150,420,000	322,000,000	427,581,000	432,262,000	94,811,982	126,286,709	240,335,638	421,477,625	414,746,303	0.56	0.84	0.75	0.99	0.96	0.01	(0.02)
6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	55,500,000	20,200,000	23,500,000	23,500,000	23,500,000	7,470,000	12,302,300	6,168,700	13,604,500	12,181,700	0.13	0.61	0.26	0.58	0.52	-	(0.10)
7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1,141,800,000	888,570,000	1,210,686,000	1,521,310,400	1,573,462,000	395,137,600	861,965,000	848,337,000	1,457,322,000	1,474,216,000	0.35	0.97	0.70	0.96	0.94	0.03	0.01
8	Penyediaan Alat Tulis Kantor	150,000,000	119,909,950	271,799,600	226,766,900	128,000,000	71,394,300	114,950,000	198,400,000	184,436,450	108,404,000	0.48	0.96	0.73	0.81	0.85	(0.44)	(0.41)
9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	192,725,000	120,000,000	120,000,000	75,000,000	77,126,000	88,617,200	119,058,600	63,336,900	72,330,900	76,054,500	0.46	0.99	0.53	0.96	0.99	0.03	0.05
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10,000,000	10,000,000	10,000,000	12,000,000	12,000,000	9,373,900	9,464,200	8,487,700	11,494,900	11,804,200	0.94	0.95	0.85	0.96	0.98	-	0.03

11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	61,800,000	63,800,000	63,800,000	205,000,000	41,000,000	16,875,000	23,642,000	12,750,000	126,341,400	38,619,000	0.27	0.37	0.20	0.62	0.94	(0.80)	(0.69)
12	Penyediaan Makanan dan Minuman	113,725,000	128,110,000	132,400,000	135,400,000	125,150,000	52,720,500	87,068,000	97,813,400	111,839,000	123,445,624	0.46	0.68	0.74	0.83	0.39	(0.08)	0.10
13	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	561,785,680	525,778,520	532,500,000	561,312,000	270,608,000	306,222,400	476,556,115	370,284,890	560,321,460	290,607,934	0.55	0.91	0.70	1.00	1.07	(0.52)	(0.48)
14	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	35,893,000	11,256,000	11,256,000	82,510,000	39,794,000	6,583,000	11,086,000	16,746,000	62,868,000	19,794,000	0.18	0.98	1.49	0.76	0.50	(0.52)	(0.69)
15	Monitoring sistem informasi pengelolaan Gaji PNSD	81,085,700	-	-	-	-	55,927,000	-	-	-	-	0.69	-	-	-	-	-	-
16	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	807,520,000	1,420,970,000	816,671,200	754,372,600	493,636,632	-	-	539,530,080	690,090,104	467,619,100	0.00	0.00	0.66	0.91	0.99	(0.35)	(0.29)
17	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	7,500,000	50,000,000	41,100,000	49,000,000	45,802,500	7,500,000	39,405,000	-	45,127,900	43,752,500	1.00	0.79	0.00	0.92	0.96	(0.07)	(0.03)
18	Pengadaan Meubelair	101,000,000	124,000,000	160,000,000	30,000,000	17,842,000	101,000,000	79,189,300	151,596,500	29,100,000	17,842,000	1.00	0.64	0.95	0.97	1.00	(0.41)	(0.39)
19	Pengadaan Peralatan Kerja	497,520,000	-	-	210,359,000	83,280,800	497,520,000	-	-	201,834,632	83,254,100	1.00	-	-	0.96	1.00	(0.60)	(0.59)
20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	25,000,000	25,000,000	193,255,500	72,854,000	85,154,700	25,000,000	-	88,170,000	65,425,677	85,154,700	1.00	0.00	0.46	0.90	1.00	0.17	0.30
21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	40,500,000	50,500,000	40,000,000	70,100,000	65,556,632	40,500,000	41,709,196	24,463,525	62,782,995	65,542,000	1.00	0.83	0.61	0.90	1.00	(0.06)	0.04
22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	20,000,000	20,000,000	17,000,000	20,000,000	15,050,000	20,000,000	9,784,600	16,810,150	17,059,000	15,008,000	1.00	0.49	0.99	0.85	1.00	(0.25)	(0.12)
23	Pemeliharaan Peralatan Kerja	36,000,000	76,000,000	64,000,000	274,979,600	156,870,000	36,000,000	64,018,210	32,473,255	248,489,400	152,996,000	1.00	0.84	0.51	0.90	0.98	(0.43)	(0.38)
24	Pemeliharaan Kebersihan Gedung Kantor	20,000,000	20,000,000	18,565,600	27,080,000	24,080,000	20,000,000	17,947,000	18,494,800	20,270,300	24,069,800	1.00	0.90	1.00	0.75	1.00	(0.11)	0.19
25	Pengadaan Peralatan Kerja	60,000,000	-	32,750,000	-	-	60,000,000	-	32,500,000	-	-	1.00	-	0.99	-	-	-	-
26	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	-	455,000,000	-	-	-	-	444,200,000	-	-	-	-	0.98	-	-	-	-	-
27	Pengadaan Komputer, Printer, Laptop dan Proyektor	-	600,470,000	250,000,000	-	-	-	572,807,940	211,175,880	-	-	-	0.95	0.84	-	-	-	-
28	Program peningkatan disiplin aparatur	223,900,000	145,000,000	69,300,000	30,500,000	126,425,000	223,900,000	-	-	30,272,000	126,335,000	1.00	-	-	0.99	1.00	3.15	3.17
29	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	81,900,000	-	-	-	63,585,000	81,900,000	-	-	-	63,580,000	1.00	-	-	-	1.00	-	-
30	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	142,000,000	145,000,000	69,300,000	30,500,000	62,840,000	142,000,000	54,899,900	25,377,500	30,272,000	62,755,000	1.00	0.38	0.37	0.99	1.00	1.06	1.07

31	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	235,510,000	99,888,100	144,750,000	366,000,000	61,216,000	-	76,488,000	124,590,200	293,241,535	66,516,000	0.00	0.77	0.86	0.80	0.99	(0.85)	(0.79)
32	Pendidikan dan Pelatihan Formal	235,510,000	99,888,100	144,750,000	366,000,000	61,216,000	-	76,488,000	124,590,200	293,241,535	60,516,000	-	0.77	0.86	0.80	0.99	(0.83)	(0.79)
33	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	362,877,000	666,250,064	-	-	362,877,000	-	469,358,645	-	-	-	1.00	0.70	-	-	-	-	-
34	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Pemkab Ngawi	48,000,000	56,723,000	-	-	-	48,000,000	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-
35	Penyusunan Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) SKPD	109,059,000	80,600,000	-	-	-	109,059,000	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-
36	Penyusunan Laporan Dana Transfer	21,800,000	-	-	-	-	21,800,000	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-
37	Penyusunan Rencana Anggaran SKPD	123,900,000	186,215,000	-	-	-	123,900,000	177,807,850	-	-	-	1.00	0.95	-	-	-	-	-
38	Penyusunan Laporan SKPD	60,118,000	70,980,000	-	-	-	60,118,000	68,408,700	-	-	-	1.00	0.96	-	-	-	-	-
39	Penyusunan Penetapan Kinerja /PK Pemda	-	35,100,000	-	-	-	-	34,680,400	-	-	-	-	0.99	-	-	-	-	-
40	Pendataan BMD	-	95,101,064	-	-	-	-	67,919,695	-	-	-	-	0.71	-	-	-	-	-
41	Bimbingan Teknis Laporan Keuangan berbasis Akrual	-	141,631,000	-	-	-	-	120,542,000	-	-	-	-	0.85	-	-	-	-	-
42	PROGRAM PENINGKATAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN SKPKD	-	-	117,863,000	-	-	-	-	108,435,397	-	-	-	-	0.92	-	-	-	-
43	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	-	-	-	-	-	-	-	38,903,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Kegiatan SKPD	-	-	5,440,000	-	-	-	-	2,346,300	-	-	-	-	0.43	-	-	-	-
45	Pendataan Barang Milik Daerah	-	-	14,540,000	-	-	-	-	14,411,500	-	-	-	-	0.99	-	-	-	-
46	Penyusunan Laporan SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Penyusunan Laporan Kinerja	-	-	97,883,000	-	-	-	-	52,778,397	-	-	-	-	0.54	-	-	-	-
48	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL / DAERAH	-	-	70,000,000	-	-	-	-	38,890,000	-	-	-	-	0.98	-	-	-	-

49	Facilitasi Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional / Daerah	-	-	70,000,000	-	-	-	-	68,890,000	-	-	-	-	0.98	-	-	-	-
50	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	4,466,702,400	686,960,000	-	-	-	4,466,702,400	631,685,580	-	-	-	1.00	0.92	-	-	-	-	-
51	Penyusunan Standar Satuan Harga	135,000,000	-	-	-	-	135,000,000	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-
52	Penyusunan Ranperda tentang APBD	632,899,000	-	-	-	-	632,899,000	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-
53	Penyusunan Ranperbup tentang Penjabaran APBD	242,425,000	-	-	-	-	242,425,000	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-
54	Penyusunan Ranperda tentang Perubahan APBD	634,080,000	-	-	-	-	634,080,000	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-
55	Penyusunan Ranperbup tentang Penjabaran Perubahan APBD	160,000,000	-	-	-	-	160,000,000	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-
56	Penyusunan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	280,037,000	-	-	-	-	280,037,000	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-
57	Penyusunan Ranperbup tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	147,000,000	-	-	-	-	147,000,000	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-
58	Penyusunan Surat Penyediaan Dana (SPD/SP2D/SKPP)	156,644,000	-	-	-	-	156,644,000	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-
59	Pemeliharaan dan Perubahan SIKD	90,000,000	150,000,000	-	-	-	90,000,000	135,663,000	-	-	-	1.00	0.90	-	-	-	-	-
60	Penyusunan Anggaran Kas Pemda	32,022,000	-	-	-	-	32,022,000	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-
61	Pedoman Penyusunan APBD dan P-APBD	210,000,000	-	-	-	-	210,000,000	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-
62	Facilitasi Sinkronisasi Ranperda tentang APBD dengan Kebijakan Pemerintah Kepentingan Publik dan Aparatur	33,000,000	-	-	-	-	33,000,000	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-
63	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah	43,152,000	-	-	-	-	43,152,000	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-
64	Penyusunan Laporan Kas Umum Daerah	13,277,000	-	-	-	-	13,277,000	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-
65	Facilitasi Sinkronisasi Ranperbup tentang Penjabaran APBD dengan Kebijakan Pemerintah, Kepentingan Publik dan Aparatur	34,000,000	-	-	-	-	34,000,000	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-

66	Pembinaan Penyusunan Anggaran SKPD	157,000,000	-	-	-	-	157,000,000	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-
67	Rekonsiliasi Kas Umum Daerah	60,611,000	-	-	-	-	60,611,000	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-
68	Sinkronisasi SPJ Fungsional SKPD	31,205,000	-	-	-	-	31,205,000	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-
69	Rekonsiliasi Iuran Pemerintah kepada BPJS dan Taspen	68,791,000	-	-	-	-	68,791,000	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-
70	Penyusunan Laporan Realisasi SP2D Anggaran Transfer	24,833,000	-	-	-	-	24,833,000	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-
71	Rekonsiliasi Laporan Keuangan	99,000,000	-	-	-	-	99,000,000	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-
72	Penyusunan dan Penerbitan SPP, SPM PPKD	162,240,000	-	-	-	-	162,240,000	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-
73	Monitoring dan Evaluasi DAK Infrastruktur Berbasis Web	118,340,000	107,210,000	-	-	-	118,340,000	97,876,800	-	-	-	1.00	0.91	-	-	-	-	-
74	Penyusunan Himpunan Surat Keputusan Bupati tentang PPKD	87,500,000	74,200,000	-	-	-	87,500,000	65,113,300	-	-	-	1.00	0.88	-	-	-	-	-
75	Penyusunan DPA dan DPPA SKPD dan PPKD	59,350,000	50,000,000	-	-	-	59,350,000	46,073,200	-	-	-	1.00	0.92	-	-	-	-	-
76	Laporan Sistem Monitoring Evaluasi Pembangunan	105,100,000	42,420,000	-	-	-	105,100,000	41,408,300	-	-	-	1.00	0.98	-	-	-	-	-
77	Penyusunan Anggaran Kas Pendapatan dan Belanja SKPD	48,350,000	64,450,000	-	-	-	48,350,000	64,214,000	-	-	-	1.00	1.00	-	-	-	-	-
78	Pengembangan SIKD	151,030,400	-	-	-	-	151,030,400	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-
79	Pembinaan Adm. Keuangan DAK Cukai BK Propinsi dan Transfer	15,816,000	-	-	-	-	15,816,000	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-
80	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) PPKD	39,000,000	-	-	-	-	39,000,000	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-
81	Fasilitasi Pergeseran anggaran sebelum PAPBD dan setelah PAPBD	215,000,000	-	-	-	-	215,000,000	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-
82	Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Penyusunan Anggaran pemda	180,000,000	-	-	-	-	180,000,000	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-
83	Pengelolaan Anggaran BTL PPKD	-	198,700,000	-	-	-	-	181,334,980	-	-	-	-	0.91	-	-	-	-	-
84	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota	983,315,000	658,030,000	-	-	-	983,315,000	538,036,900	-	-	-	1.00	0.82	-	-	-	-	-

85	Evaluasi Petaksanaan APBD	105,000,000	-	-	-	-	105,000,000	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-
86	Pembinaan pelaporan dan akuntansi keu SKPD	89,000,000	-	-	-	-	89,000,000	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-
87	Pembinaan adm keu hibah bansos dan BK	163,025,000	-	-	-	-	163,025,000	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-
88	Fasilitasi Adm. Keu hibah bansos dan BK	406,290,000	464,570,000	-	-	-	406,290,000	367,687,300	-	-	-	1.00	0.79	-	-	-	-	-
89	Evaluasi Adm. Pengelolaan Hibah, Bansos dan BK	-	193,460,000	-	-	-	-	170,349,600	-	-	-	-	0.88	-	-	-	-	-
90	Penerapan Laporan Keu berbasis akrual	120,000,000	-	-	-	-	120,000,000	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-
91	Pembinaan dan Pelaporan persediaan barang SKPD	100,000,000	-	-	-	-	100,000,000	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-
92	Program Peningkatan Pendapatan Daerah	4,803,468,800	1,777,257,600	-	-	-	4,803,468,800	1,731,200,847	-	-	-	1.00	0.97	-	-	-	-	-
93	Penyusunan rencana lain2 pendapatan daerah	174,560,000	-	-	-	-	174,560,000	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-
94	Intensifikasi Pajak Daerah	544,927,000	-	-	-	-	544,927,000	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-
95	Evaluasi Pendapatan Daerah	163,100,000	-	-	-	-	163,100,000	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-
96	Intensifikasi Penagihan Tunggakan PBB	202,743,500	78,932,000	-	-	-	202,743,500	78,932,000	-	-	-	1.00	1.00	-	-	-	-	-
97	Penyuluhan Pajak Daerah	45,000,000	-	-	-	-	45,000,000	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-
98	Sinkronisasi dan Koordinasi Dana2 Transfer	49,400,000	-	-	-	-	49,400,000	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-
99	Review/ pembaharuan regulasi tentang pendapatan Daerah	155,000,000	-	-	-	-	155,000,000	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-
100	Monitoring dan Evaluasi Lain2 Pendapatan Daerah	207,844,000	-	-	-	-	207,844,000	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-
101	Penyusunan Potensi Peningkatan Pajak Daerah	165,000,000	-	-	-	-	165,000,000	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-
102	Pelaporan dan Evaluasi Pajak Daerah	96,750,000	-	-	-	-	96,750,000	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-
103	Sosialisasi PBB P2	93,741,250	81,011,000	-	-	-	93,741,250	80,972,000	-	-	-	1.00	1.00	-	-	-	-	-
104	Evaluasi Penerimaan PBB	127,392,500	104,469,700	-	-	-	127,392,500	77,893,650	-	-	-	1.00	0.75	-	-	-	-	-
105	Penerbitan SPPT, STTS dan DHKP	308,548,500	183,848,800	-	-	-	308,548,500	183,233,800	-	-	-	1.00	1.00	-	-	-	-	-
106	Pemeliharaan dan Pemutahiran Basis Data PBB P2	311,848,500	65,332,300	-	-	-	311,848,500	65,332,300	-	-	-	1.00	1.00	-	-	-	-	-

107	Penelitian Penyampaian dan Pengembalian SFPT PBB P2	622,568,500	604,382,500	-	-	-	622,568,500	588,975,500	-	-	-	1.00	0.97	-	-	-	-	-
108	Pedoman Pelayanan pendataan perubahan dan penetapan PBBP2	342,232,250	27,308,900	-	-	-	342,232,250	27,308,750	-	-	-	1.00	1.00	-	-	-	-	-
109	Optimalisasi Pemasukan PBB	1,076,812,800	631,972,460	-	-	-	1,076,812,800	628,552,847	-	-	-	1.00	0.99	-	-	-	-	-
110	Pemetaan dan Pengembangan Retribusi Daerah	116,000,000	-	-	-	-	116,000,000	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-
111	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AKUNTANSI PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	-	1,068,546,600	-	-	-	-	992,091,090	-	-	-	-	0.93	-	-	-	-	-
112	Penyusunan Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD	-	323,186,600	-	-	-	-	319,128,140	-	-	-	-	0.99	-	-	-	-	-
113	Penyusunan Ranperbup tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD	-	146,140,500	-	-	-	-	144,364,300	-	-	-	-	0.99	-	-	-	-	-
114	Rekonsiliasi Penerimaan SKPD	-	32,335,500	-	-	-	-	31,062,200	-	-	-	-	0.96	-	-	-	-	-
115	Rekonsiliasi Pengeluaran SKPD	-	39,895,000	-	-	-	-	37,927,700	-	-	-	-	0.95	-	-	-	-	-
116	Konsolidasi Laporan Keu	-	93,825,000	-	-	-	-	91,473,500	-	-	-	-	0.97	-	-	-	-	-
117	Penyusunan LKIP PPKD	-	40,000,000	-	-	-	-	32,856,900	-	-	-	-	0.82	-	-	-	-	-
118	Evaluasi Pelaksanaan APBD	-	117,838,000	-	-	-	-	112,795,650	-	-	-	-	0.96	-	-	-	-	-
119	Pembinaan Pelaporan SKPD	-	275,326,000	-	-	-	-	222,482,700	-	-	-	-	0.81	-	-	-	-	-
120	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KAB/KOTA	-	-	744,282,000	-	-	-	-	367,543,300	-	-	-	-	0.49	-	-	-	-
121	Monitoring dan Efalisasi DAK Infrastruktur Berbasis WEB	-	-	170,000,000	-	-	-	-	122,582,000	-	-	-	-	0.72	-	-	-	-
122	Penyusunan Anggaran Kas Pendapatan dan Anggaran Kas Belanja SKPD	-	-	5,400,000	-	-	-	-	5,181,200	-	-	-	-	0.96	-	-	-	-
123	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan SKPD / PPKD	-	-	268,568,000	-	-	-	-	151,125,100	-	-	-	-	0.56	-	-	-	-

124	Fasilitasi Pemeliharaan dan Perubahan Sistem Informasi Keuangan Daerah	-	-	107,920,000	-	-	-	-	62,105,000	-	-	-	-	0.58	-	-	-	-
125	Evaluasi Administrasi Pengelolaan Keuangan Hibah, Bansos dan Bantuan Keuangan	-	-	192,394,000	-	-	-	-	26,550,000	-	-	-	-	0.14	-	-	-	-
126	PROGRAM PENINGKATAN PAJAK DAERAH DAN PENDAPATAN LAIN-LAIN	-	-	1,269,389,000	-	-	-	-	880,563,000	-	-	-	-	0.70	-	-	-	-
127	Keg. Intensifikasi Pajak Daerah	-	-	504,961,000	-	-	-	-	339,828,000	-	-	-	-	0.67	-	-	-	-
128	Keg. Review Pembaharuan Regulasi tentang Pajak Daerah	-	-	286,226,000	-	-	-	-	281,864,000	-	-	-	-	0.98	-	-	-	-
129	Keg. Penyusunan Potensi Peningkatan Pajak Daerah	-	-	232,750,000	-	-	-	-	130,000,000	-	-	-	-	0.56	-	-	-	-
130	Keg. Penyusunan Rencana dan Evaluasi Pendapatan Retribusi dan Pendapatan Lain - Lain	-	-	172,492,000	-	-	-	-	90,060,000	-	-	-	-	0.52	-	-	-	-
131	Keg. Monitoring dan Pembinaan Pendapatan Daerah	-	-	72,940,000	-	-	-	-	41,811,000	-	-	-	-	0.57	-	-	-	-
132	PROGRAM MANAJEMEN PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB - P2)	-	-	1,644,299,700	-	-	-	-	1,057,944,053	-	-	-	-	0.65	-	-	-	-
133	Keg. Intensifikasi Penagihan Tunggakan PBB - P2	-	-	98,142,000	-	-	-	-	85,911,643	-	-	-	-	0.88	-	-	-	-
134	Keg. Pemeliharaan dan Pemutahiran Basis Data PBB -P2	-	-	40,809,000	-	-	-	-	24,982,800	-	-	-	-	0.61	-	-	-	-
135	Keg. Optimalisasi dan Evaluasi Penerimaan PBB-P2	-	-	523,099,700	-	-	-	-	392,722,867	-	-	-	-	0.75	-	-	-	-
136	Keg. Review / Pembaharuan Regulasi Tentang PBB - P2	-	-	8,188,500	-	-	-	-	7,957,743	-	-	-	-	0.97	-	-	-	-
137	Keg. Penerbitan, Penelitian, Penyampaian dan Pengembalian SPPT, STTS dan DHKP PBB P2	-	-	974,050,500	-	-	-	-	556,369,000	-	-	-	-	0.57	-	-	-	-

138	PROGRAM PENYUSUNAN ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH DAN PAKET REGULASI PENGANGGARAN			2,649,235,300					1,554,558,934					0.59				
139	Penyusunan Rancangan Perda Tentang APBD	-	-	757,657,000	-	-	-	-	483,273,052	-	-	-	-	0.64	-	-	-	-
140	Keg. Penyusunan Rencana Peraturcn Bupati Tentang Penjabaran APBD	-	-	217,532,800	-	-	-	-	40,992,900	-	-	-	-	0.19	-	-	-	-
141	Keg. Penyusunan Rencana Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	-	-	568,400,000	-	-	-	-	507,535,901	-	-	-	-	0.89	-	-	-	-
142	Keg. Penyusunan Rancangan Perbup tentang Penjabaran Perubahan APBD	-	-	155,449,000	-	-	-	-	108,319,081	-	-	-	-	0.70	-	-	-	-
143	Keg. Penyusunan Standar Satuan Harga	-	-	50,369,200	-	-	-	-	19,879,500	-	-	-	-	0.39	-	-	-	-
144	Keg. Fasilitasi Singkronisasi Raperda tentang APBD dengan Kebijakan Kepentingan Publik dan Aparatur	-	-	11,886,000	-	-	-	-	6,101,000	-	-	-	-	0.51	-	-	-	-
145	Keg. Fasilitasi Singkronisasi Raperbup tentang Penjabaran APBD dengan Kebijakan Pemerintah, Kepentingan Publik dan Aparatur	-	-	17,486,000	-	-	-	-	6,909,400	-	-	-	-	0.40	-	-	-	-
146	Keg. Pembinaan Penyusunan Anggaran SKPD	-	-	591,234,300	-	-	-	-	275,997,500	-	-	-	-	0.47	-	-	-	-
147	Keg. Fasilitasi Pergeseran Anggaran Sebelum Perubahan APBD dan Setelah PAPBD	-	-	27,305,000	-	-	-	-	7,050,600	-	-	-	-	0.26	-	-	-	-
148	Keg. Penyusunan Standarisasi Jenis Obyek dan Rincian Obyek Belanja	-	-	251,916,000	-	-	-	-	98,500,000	-	-	-	-	0.39	-	-	-	-
149	PROGRAM PELAYANAN PELAKSANAAN APBD DAN PERUBAHAN APBD			586,981,000					366,524,111					0.62				
150	Keg. Fasilitasi Pengelolaan Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah	-	-	32,417,000	-	-	-	-	10,989,000	-	-	-	-	0.34	-	-	-	-
151	Keg. Penyusunan Surat Penyediaan Dana (SP2D) / SP2D / SKPP	-	-	148,278,000	-	-	-	-	131,360,000	-	-	-	-	0.89	-	-	-	-

152	Keg. Penyusunan Anggaran Kas Pemerintah Daerah	-	-	52,812,000	-	-	-	-	31,842,000	-	-	-	-	0.60	-	-	-	-
153	Keg. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah	-	-	89,605,000	-	-	-	-	49,226,500	-	-	-	-	0.55	-	-	-	-
154	Keg. Penyusunan Laporan Kas Umum Daerah	-	-	79,184,000	-	-	-	-	40,483,500	-	-	-	-	0.51	-	-	-	-
155	Keg. Rekonsiliasi dan Koordinasi Dana Transfer, PBIJKN dan Taspen	-	-	89,260,000	-	-	-	-	21,233,111	-	-	-	-	0.24	-	-	-	-
156	Keg. Penyusunan Sistem dan Prosedur Penatausahaan Keuangan Daerah	-	-	95,325,000	-	-	-	-	81,390,000	-	-	-	-	0.85	-	-	-	-
157	PROGRAM PENATAAN DAN PRMANFAATAN ASET	-	-	1,781,298,500	-	-	-	-	1,058,634,869	-	-	-	-	0.59	-	-	-	-
158	Keg. Sertifikasi tanah Aset Pemda Kab. Ngawi	-	-	396,807,000	-	-	-	-	120,301,250	-	-	-	-	0.30	-	-	-	-
159	Keg. Penatausahaan Aset Daerah	-	-	100,758,000	-	-	-	-	80,481,024	-	-	-	-	0.80	-	-	-	-
160	Keg. Penertiban dan Pengendalian Aset Daerah	-	-	350,305,500	-	-	-	-	265,286,200	-	-	-	-	0.76	-	-	-	-
161	Keg. Pembinaan dan Pemanfaatan aset Daerah	-	-	609,263,000	-	-	-	-	443,693,900	-	-	-	-	0.73	-	-	-	-
162	Keg. Rekonsiliasi dan Penyusunan Aset Daerah	-	-	324,165,000	-	-	-	-	148,872,495	-	-	-	-	0.46	-	-	-	-
163	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AKUNTANSI PELAPORAN CAPAIAN KINERJA	-	-	1,763,674,000	-	-	-	-	1,268,971,100	-	-	-	-	0.72	-	-	-	-
164	Keg. Penyusunan Rancangan Perda Tentang Pertanggungjawaban APBD	-	-	885,563,000	-	-	-	-	694,503,100	-	-	-	-	0.78	-	-	-	-
165	Keg. Penyusunan Rancangan Ranperbup Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD	-	-	140,113,000	-	-	-	-	119,204,500	-	-	-	-	0.85	-	-	-	-
166	Keg. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis	-	-	23,389,000	-	-	-	-	21,749,000	-	-	-	-	0.93	-	-	-	-
167	Keg. Rekonsiliasi Penerimaan dan Pengeluaran SKPD	-	-	50,575,000	-	-	-	-	32,203,000	-	-	-	-	0.64	-	-	-	-

168	Keg. Penyusunan Laporan Kinerja Instransi Pemerintah (KLIP PPKD)	-	-	18,682,000	-	-	-	-	16,833,500	-	-	-	-	0.90	-	-	-	-
169	Keg. Evaluasi Pelaksanaan APBD	-	-	38,372,000	-	-	-	-	19,691,000	-	-	-	-	0.51	-	-	-	-
170	Keg. Pembinaan Pelaporan Keuangan Dan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD	-	-	606,980,000	-	-	-	-	364,787,000	-	-	-	-	0.60	-	-	-	-
171	Program Penataan dan Pemanfaatan Aset	1,126,000,000	1,678,696,400	-	-	-	1,126,000,000	1,672,121,343	-	-	-	1.00	1.12	-	-	-	-	-
172	Sertifikasi Tanah Aset Pemda Ngawi	42,000,000	46,599,000	-	-	-	42,000,000	16,740,700	-	-	-	1.00	0.36	-	-	-	-	-
173	Penghapusan Aset Daerah	263,500,000	237,665,400	-	-	-	263,500,000	189,574,700	-	-	-	1.00	0.80	-	-	-	-	-
174	Penertiban Aset Daerah	197,000,000	106,167,000	-	-	-	197,000,000	88,181,800	-	-	-	1.00	0.88	-	-	-	-	-
175	Pembinaan dan Pengelolaan Aset Daerah	397,000,000	701,831,000	-	-	-	397,000,000	701,458,093	-	-	-	1.00	1.00	-	-	-	-	-
176	Penyusunan Laporan Smesteran dan Tahunan Aset Daerah	71,000,000	101,489,000	-	-	-	71,000,000	100,087,150	-	-	-	1.00	0.99	-	-	-	-	-
177	Rekonsiliasi Aset	35,500,000	96,805,000	-	-	-	35,500,000	87,944,400	-	-	-	1.00	0.91	-	-	-	-	-
178	Penyusunan Perda tentang Pokok2 Pengelolaan Barang Milik Daerah	120,000,000	153,824,000	-	-	-	120,000,000	151,536,200	-	-	-	1.00	0.99	-	-	-	-	-
179	PEMBINAAN DAN PEMELIHARAAN APLIKASI SIMBADA	-	140,116,000	-	-	-	-	137,917,100	-	-	-	-	0.98	-	-	-	-	-
180	PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	-	100,000,000	-	-	-	-	398,681,200	-	-	-	-	3.99	-	-	-	-	-
181	PROGRAM PELAYANAN PELAKSANAAN APBD DAN PERUBAHAN APBD	-	482,144,587	-	-	-	-	1,508,158,750	-	-	-	-	3.13	-	-	-	-	-
182	monitoring sistem informasi pengelolaan gaji pegawai negeri sipil daerah	-	55,422,000	-	-	-	-	121,980,900	-	-	-	-	2.20	-	-	-	-	-
183	penyusunan surat penyediaan dana (spd/sp2d/skpp)	-	127,016,587	-	-	-	-	16,254,500	-	-	-	-	0.13	-	-	-	-	-
184	penyusunan anggaran kas pemerintah daerah	-	16,320,000	-	-	-	-	44,848,000	-	-	-	-	2.75	-	-	-	-	-
185	pembinaan penatausahaan keuangan daerah	-	99,113,900	-	-	-	-	99,469,900	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-
186	penyusunan laporan kas umum daerah	-	102,758,400	-	-	-	-	6,794,500	-	-	-	-	0.07	-	-	-	-	-

187	rekonsiliasi kas umum daerah		6,818,000	-	-	-	-	25,994,500	-	-	-	-	3.81	-	-	-	-	-
188	rekonsiliasi iuran pemerintah kepada bps dan taspen		37,707,600	-	-	-	-	31,806,000	-	-	-	-	0.84	-	-	-	-	-
189	koordinasi, konsultasi dan laporan dana transfer perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah		36,988,100	-	-	-	-	1,161,010,450	-	-	-	-	31.39	-	-	-	-	-
190	PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH		1,693,866,100	-	-	-	-	3,243,175,162	-	-	-	-	1.92	-	-	-	-	-
191	intensifikasi pajak daerah		444,000,000	-	-	-	-	219,092,900	-	-	-	-	0.49	-	-	-	-	-
192	review/pembaharuan regulasi tentang pendapatan daerah		453,571,100	-	-	-	-	185,910,950	-	-	-	-	0.41	-	-	-	-	-
193	penyusunan potensi peningkatan pajak daerah		203,800,000	-	-	-	-	28,907,000	-	-	-	-	0.14	-	-	-	-	-
194	pelaporan dan evaluasi pajak daerah		87,000,000	-	-	-	-	93,262,000	-	-	-	-	1.07	-	-	-	-	-
195	penyusunan rencana pendapatan daerah		103,566,000	-	-	-	-	131,721,000	-	-	-	-	1.27	-	-	-	-	-
196	evaluasi pendapatan daerah		177,000,000	-	-	-	-	95,391,600	-	-	-	-	0.54	-	-	-	-	-
197	monitoring dan pembinaan pendapatan daerah		138,629,000	-	-	-	-	81,414,000	-	-	-	-	0.59	-	-	-	-	-
198	pemetaan dan pengembangan retribusi daerah		85,800,000	-	-	-	-	2,407,476,312	-	-	-	-	28.06	-	-	-	-	-
199	PROGRAM PENYUSUNAN ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH DAN PAKET REGULASI PENGANGGARAN		2,807,500,000	-	-	-	-	1,781,389,312	-	-	-	-	0.63	-	-	-	-	-
200	penyusunan rancangan peraturan daerah tentang apbd	-	679,143,500	-	-	-	-	82,972,200	-	-	-	-	0.12	-	-	-	-	-
201	penyusunan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran apbd	-	155,546,000	-	-	-	-	576,820,600	-	-	-	-	3.71	-	-	-	-	-
202	penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan apbd	-	581,220,000	-	-	-	-	146,441,850	-	-	-	-	0.25	-	-	-	-	-
203	penyusunan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran perubahan apbd	-	153,497,000	-	-	-	-	38,853,250	-	-	-	-	0.25	-	-	-	-	-
204	penyusunan standar satuan harga	-	80,000,000	-	-	-	-	94,581,750	-	-	-	-	1.18	-	-	-	-	-

205	pedoman penyusunan apbd dan perubahan apbd	-	96,300,000	-	-	-	-	4,967,450	-	-	-	-	0.05	-	-	-	-	-
206	fasilitasi sinkronisasi raperda tentang apbd dengan kebijakan kepentingan publik dan aparatur	-	22,000,000	-	-	-	-	13,648,600	-	-	-	-	0.62	-	-	-	-	-
207	fasilitasi sinkronisasi raperbup tentang penjabaran apbd dengan kebijakan pemerintah, kepentingan publik dan aparatur	-	25,000,000	-	-	-	-	684,732,912	-	-	-	-	27.39	-	-	-	-	-
208	pembinaan penyusunan anggaran skpd	-	849,793,500	-	-	-	-	138,370,700	-	-	-	-	0.16	-	-	-	-	-
209	fasilitasi pergeseran anggaran sebelum perubahan apbd dan setelah perubahan apbd	-	165,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-
210	Program peningkatan capaian kinerja dan keuangan satuan kerja perangkat daerah dan satuan kerja pengelola keuangan daerah	-	0	-	76,750,000	66,561,000	-	125,178,800	69,272,800	66,453,700	-	-	-	0.90	1.00	(0.13)	(0.04)	
211	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Laporan Kinerja OPD/SKPD	-	-	-	70,000,000	60,923,000	-	12,349,200	62,637,800	60,861,700	-	-	-	0.89	1.00	(0.13)	(0.03)	
212	Penyusunan Laporan Keuangan OPD/SKPD	-	-	-	6,750,000	5,638,000	-	112,829,600	6,735,000	5,592,000	-	-	-	1.00	0.99	(0.16)	(0.17)	
213	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	-	0	-	353,750,000	-	-	1,234,386,850	290,312,910	-	-	-	0.82	-	-	(1.00)	(1.00)	
214	Monitoring dan Evaluasi DAK Infrastruktur Berbasis Web	-	-	-	83,750,000	-	-	154,386,850	76,768,600	-	-	-	0.92	-	-	-	(1.00)	
215	Fasilitasi Pengelolaan Anggaran Belanja Tidak Langsung PPKD	-	-	-	270,000,000	-	-	1,080,000,000	213,544,310	-	-	-	0.79	-	-	-	(1.00)	
216	Program fasilitasi pemungutan dan pencatatan pendapatan daerah	-	0	-	1,141,590,000	-	-	2,054,862,000	1,004,616,800	-	-	-	0.68	-	-	(1.00)	(1.00)	
217	Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak Daerah	-	-	-	589,250,000	-	-	1,060,650,000	468,417,000	-	-	-	0.79	-	-	-	(1.00)	
218	Fasilitasi Penagihan Pajak Daerah	-	-	-	461,000,000	-	-	829,800,000	451,767,800	-	-	-	0.98	-	-	-	(1.00)	

219	Pencatatan dan Evaluasi Pendapatan Daerah	-	-	-	91,340,000	-	-	-	164,412,000	84,432,000	-	-	-	0.92	-	-	(1.00)
220	Program Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	-	0	-	-	1,894,350,000	-	-	1,890,450,000	1,833,735,250	-	-	-	0.97	-	-	-
221	Perencanaan Pajak Daerah	-	-	-	-	210,167,000	-	-	1,060,650,000	194,646,450	-	-	-	0.93	-	-	-
222	Fasilitasi Penetapan Pajak Daerah	-	-	-	-	1,450,265,000	-	-	829,800,000	1,413,563,300	-	-	-	0.97	-	-	-
223	Pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah	-	-	-	-	233,918,000	-	-	-	225,559,500	-	-	-	0.96	-	-	-
224	Program manajemen pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (pbb-p2)	-	0	-	1,662,513,000	-	-	-	1,875,015,600	1,529,946,235	-	-	-	0.92	-	(1.00)	(1.00)
225	Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	-	-	-	231,780,000	-	-	-	158,136,000	215,564,800	-	-	-	0.93	-	-	-
226	Evaluasi dan Optimalisasi Penerimaan PBB-P2	-	-	-	478,770,000	-	-	-	574,524,000	437,570,435	-	-	-	0.91	-	-	-
227	Ekstensifikasi Obyek dan Subyek PBB-P2	-	-	-	951,963,000	-	-	-	1,142,355,600	876,811,000	-	-	-	0.92	-	-	-
228	Program Pengelolaan Pajak Daerah	-	0	-	-	1,152,042,000	-	-	1,716,879,600	1,063,944,281	-	-	-	0.93	-	-	-
229	Penagihan Pajak Daerah	-	-	-	-	285,570,500	-	-	-	277,667,900	-	-	-	0.97	-	-	-
230	Fasilitasi Penyusunan Laporan Pendapatan	-	-	-	-	155,496,000	-	-	574,524,000	128,787,000	-	-	-	0.83	-	-	-
231	Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah	-	-	-	-	710,975,500	-	-	1,142,355,600	663,489,381	-	-	-	0.93	-	-	-
232	Program penyusunan anggaran pemerintah daerah	-	0	-	3,075,292,000	-	-	-	3,895,734,500	2,591,169,394	-	-	-	0.84	-	(1.00)	(1.00)
233	Pembinaan Penyusunan Anggaran Pemerintah Daerah	-	-	-	687,412,000	-	-	-	824,894,500	619,629,800	-	-	-	0.90	-	(1.00)	-
234	Penyusunan Ranperda dan Ranperbup Tentang APBD	-	-	-	2,087,530,000	-	-	-	2,350,000,000	1,678,064,360	-	-	-	0.80	-	(1.00)	-
235	Penyusunan Regulasi Penganggaran	-	-	-	300,350,000	-	-	-	720,840,000	293,475,234	-	-	-	0.98	-	(1.00)	-
236	Program Manajemen Perencanaan Anggaran Pemerintah Daerah	-	0	-	-	2,471,130,400	-	-	-	2,346,825,210	-	-	-	0.95	-	-	-
237	Kegiatan Pembinaan dan Penyusunan Regulasi Anggaran Pemerintah daerah	-	-	-	-	591,615,400	-	-	-	567,291,200	-	-	-	0.96	-	-	-

238	Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Anggaran	-	-	-	-	1,556,112,000	-	-	-	-	1,493,034,758	-	-	-	-	0.96	-	-	
239	Kegiatan Penyusunan dan Perencanaan Anggaran Pemerintah Daerah	-	-	-	-	323,403,000	-	-	-	-	286,499,252	-	-	-	-	0.89	-	-	
240	Program penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	-	0	-	1,707,811,000	-	-	2,048,251,000	1,582,681,240	-	-	-	-	-	-	0.93	-	(1.00)	(1.00)
241	Pembinaan Pelaporan Keuangan dan Konsolidasi Laporan Keuangan	-	-	-	728,072,000	-	-	873,686,000	688,659,700	-	-	-	-	-	-	0.95	-	-	
242	Penyusunan Ranperda dan Ranperbup Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	-	-	-	863,021,000	-	-	1,034,500,000	778,796,940	-	-	-	-	-	-	0.90	-	-	
243	Fasilitasi Pembinaan, Monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBD	-	-	-	116,716,000	-	-	140,065,000	115,224,600	-	-	-	-	-	-	0.99	-	-	
244	Program Manajemen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-	0	-	-	1,540,357,000	-	-	-	-	1,502,080,550	-	-	-	-	0.98	-	-	
245	Kegiatan Fasilitasi, Rekonsiliasi & Konsolidasi Akuntansi Penerimaan	-	-	-	-	65,917,000	-	-	-	-	59,490,000	-	-	-	-	0.90	-	-	
246	Kegiatan Fasilitasi Rekonsiliasi & Konsolidasi Akuntansi Pengeluaran	-	-	-	-	62,782,000	-	-	-	-	59,761,500	-	-	-	-	0.95	-	-	
247	Kegiatan Pembinaan entitas Pelaporan	-	-	-	-	413,730,000	-	-	-	-	407,680,850	-	-	-	-	0.99	-	-	
248	Kegiatan Penyusunan ranperda dan ranperbup tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	-	-	-	-	997,928,000	-	-	-	-	975,148,200	-	-	-	-	0.98	-	-	
249	Program penatausahaan keuangan pemerintah daerah	-	0	-	-	643,284,000	-	1,286,568,000	612,394,768	563,923,600	-	-	-	-	-	0.88	-	(0.08)	
250	Fasilitasi Pelaksanaan Penatausahaan Belanja Tidak Langsung	-	-	-	-	119,335,000	-	238,670,000	108,574,279	104,539,950	-	-	-	-	-	0.88	-	(0.04)	
251	Fasilitasi Pelaksanaan Penatausahaan Belanja Langsung	-	-	-	-	391,087,000	-	782,174,000	379,307,916	358,401,950	-	-	-	-	-	0.92	-	(0.06)	
252	Fasilitasi Pelaksanaan Penatausahaan Kas Umum Daerah	-	-	-	-	132,862,000	-	265,724,000	124,512,573	100,981,700	-	-	-	-	-	0.76	-	(0.19)	
253	Program pengelolaan barang milik daerah	-	0	-	1,968,100,000	1,940,328,500	-	6,112,600,000	1,850,193,814	1,746,868,100	-	-	-	-	-	0.94	0.90	(0.01)	(0.06)

254	Fasilitasi Penatausahaan Pengelolaan BMD	-	-	-	-	-	-	881,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
255	Fasilitasi Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD	-	-	-	-	-	-	2,176,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
256	Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD	-	-	-	-	-	-	2,176,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
257	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian BMD	-	-	-	-	-	-	878,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
258	Penggunaan dan Pemanfaatan BMD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
259	Fasilitasi Penatausahaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-	-	440,900,000	265,909,500	-	-	410,170,174	263,584,900	-	-	-	0.93	0.99	(0.40)	(0.36)
260	Pengamanan, Pemindahtanganan dan Penghapusan SMD	-	-	-	1,088,200,000	1,128,065,000	-	-	1,016,346,300	976,475,400	-	-	-	0.93	0.87	0.04	(0.04)
261	Penggunaan dan Pemanfaatan Sarang Milik Daerah	-	-	-	439,000,000	546,354,000	-	-	423,677,640	505,807,880	-	-	-	0.97	0.93	0.24	0.20

Indikator Renstra tercapai kategori baik yaitu tingkat keberhasilan kriteria capaian kinerja sebagai berikut :

- 1) Capaian lebih dari 100 % (sangat Baik)
- 2) Capaian 75% sampai 100% (Baik)
- 3) Capaian 55% sampai 74 % (Cukup)
- 4) Capaian kurang dari 54 % (Kurang)

Dari Tabel T-C.23 Realisasi dan Rasio Capaian meningkat tiap tahunnya, hal ini menunjukkan kinerja yang terus meningkat sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dari Tabel T-C.24 pencapaian secara pendanaan tiap tahun selama periode Renstra, Rasio Realisasi dan Anggaran Tahun 2016-2018 stabil dalam kategori baik dan mengalami peningkatan di tahun 2019 dan 2020. Kurun waktu 2016-2018 tersebut terdapat perubahan nomenklatur program kegiatan yang berpengaruh terhadap penetapan dan pencapaian indikator kinerjanya.

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN OPD

Badan Keuangan merupakan bagian penting dalam proses penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Menurut Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031, Kabupaten Ngawi termasuk dalam Wilayah Pengembangan (WP) Madiun dengan fungsi pertanian tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, kehutanan, peternakan, pertambangan, pariwisata, pendidikan, kesehatan, dan industri. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 menegaskan perlunya komitmen terhadap Program pembangunan berkelanjutan atau SDGS (Sustainable Development Goals) yang harus diprioritaskan untuk penyusunan RPJMD dan pelaksanaan program kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah. Regulasi tersebut termasuk juga regulasi terkait pengelolaan keuangan yang berkembang dan berubah secara dinamis menjadi tantangan dan sekaligus peluang dalam meningkatkan kualitas pelayanan keuangan daerah.

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Keuangan Kabupaten Ngawi adalah sebagai berikut :

b. Tantangan

1. Perubahan regulasi yang berubah dengan dinamis dan cepat antara lain

- Perpres 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
 - Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD),
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyediakan dan menyajikan informasi secara berjenjang dan mandiri berupa penggolongan / pengelompokan, pemberian kode, dan daftar penamaan menuju single codebase untuk digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja keuangan dan
 - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai pengganti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 dan diterbit untuk menindaklanjuti Pasal 6 dan Lampiran huruf A angka 4 Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Pemerintah Daerah melakukan Pemutakhiran, pemetaan dan penyesuaian program, kegiatan, dan organisasi menurut klasifikasi, kodefikasi serta nomenklatur dan menindaklanjutinya dengan perubahan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Pengintegrasian Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah mulai dari modul perencanaan, penganggaran, penatausahaan aset dan pertanggungjawaban yang berdampak pada perubahan proses bisnis pengelolaan keuangan dan Evaluasi Kelembagaan
 3. Dinamika perkembangan sosial masyarakat, politik dan ekonomi nasional maupun regional yang berpengaruh terhadap kondisi keuangan

daerah (misalnya adanya Pandemi Covid-19 berdampak terhadap penurunan pendapatan Daerah)

4. Pengelolaan BMD yang belum Optimal. Permasalahan BMD seringkali menjadi temuan dalam audit BPK, permasalahan yang dihadapi antara lain terkait sertifikasi Aset tanah (tanah darat, tanah bawah jalan dan tanah bawah irigasi) yang belum bersertifikat, belum dibangunnya aplikasi BMD menyesuaikan dengan peraturan terbaru.

b. Peluang

1. Komitmen pimpinan untuk peningkatan pelayanan prima dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
2. Perubahan regulasi yang dinamis dan semakin detail serta terperinci menuntut Reformasi Birokrasi pengelolaan keuangan dan BMD sehingga meningkatnya tuntutan untuk semakin akuntabel dalam pelaksanaan dan pertanggungjawabannya
3. Pendataan ulang terhadap potensi sumber-sumber pendapatan daerah
4. Pengelolaan Keuangan Daerah yang teintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)
5. Tuntutan regulasi penatausahaan keuangan daerah yang mengamanatkan semua transaksi daerah menggunakan pola transaksi non-Tunai
6. Peningkatan Kemampuan SDM melalui pendidikan pelatihan formal berupa; bintek, diklat, kursus terhadap aparatur
7. Kualitas, kompetensi dan kapasitas SDM pada bidang layanan yang masih dapat ditingkatkan;

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN OPD

Dalam rangka mendukung visi dan misi Bupati Ngawi sebagaimana telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ngawi Tahun 2022-2026, Badan Keuangan Kabupaten Ngawi telah mengidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, antara lain:

1. Belum Optimalnya Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah. Beberapa permasalahan klasik yang terus perlu mendapatkan perhatian dan pengambilan sikap antara lain Perencanaan Target Pendapatan Daerah, kecepatan dan ketepatan penyampaian Surat Penetapan Pajak Tahunan (SPPT), Pendataan potensi pajak lebih akurat dan mudah dalam sistem pengenaan pajak maupun pelayanan setoran pajak, intensifikasi maupun ekstensifikasi pajak harus terus menerus dilakukan
2. Belum optimalnya pengelolaan keuangan dan pengelolaan BMD kategori baik;
3. Masih kurangnya pemahaman SKPD tentang pengelolaan keuangan;
4. Kurangnya pemahaman SKPD dalam memahami peraturan perundang-undangan yang baru tentang penyusunan anggaran daerah, masih terjadi kesalahan pembebanan belanja yang berdampak kesulitan terhadap pencatatan dalam laporan pertanggungjawaban keuangan;
5. Aplikasi (Misalnya SP2D Dengan Bank, SISMIOP di kecamatan) belum terlaksana secara online;
6. Penyampaian laporan BMD yang tidak tepat waktu, kurangnya SDM seringkali menjadi kendala dalam penyusunan laporan BMD, agar penyusunan laporan BMD dapat dilakukan secara efektif dan efisien, tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan perlu dibangun Aplikasi BMD terintegrasi berbasis Teknologi Informasi

Identifikasi tersebut selaras dengan dokumen RPJMD Kabupaten Ngawi yaitu :

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
Kualitas tata kelola pemerintahan masih harus tingkatkan menuju birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien serta pelayanan publik yang berkualitas.	Pengelolaan keuangan daerah masih harus ditingkatkan, terutama terkait optimalisasi pendapatan dan pengelolaan barang milik daerah.	Belum optimalnya pengelolaan keuangan dan pengelolaan BMD kategori baik
		Identifikasi potensi sumber pendapatan yang belum optimal.
		Lemahnya pengawasan atas pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
		Kepatuhan dan kesadaran wajib pajak atau retribusi yang relatif rendah.

Tabel.T-B.35. Identifikasi Permasalahan

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berangkat dari Visi Misi BupatiNgawi terpilih yang tertuang dalam dokumen RPJMD 2021-2026 yaitu :

SEMESTA BERENCANA “Terwujudnya masyarakat Kabupaten Ngawi yang mandiri, berakhlak, makmur dan berdaya saing berbasis agropolitan dengan semangat gotong royong dalam bingkai NKRI”

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 4 (empat) yaitu ;

1. Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing melalui kemudahan terhadap akses pelayanan kepada masyarakat

2. Mengembangkan perekonomian kerakyatan melalui kemudahan investasi, pariwisata berbasis potensi lokal dan pertanian ramah lingkungan berkelanjutan didukung riset dan teknologi
3. Meningkatkan etos kerja dan integritas aparatur pemerintahan guna memberikan pelayanan prima
4. Meningkatkan kualitas infrastruktur guna percepatan pembangunan yang berkesinambungan
5. Meningkatkan kondusifitas daerah melalui pengembangan budaya lokal yang berlandaskan keagamaan dan gotong-royong

Pada penjabaran visi tersebut Badan Keuangan berkaitan erat dengan misi ke-3 yaitu; Meningkatkan etos kerja dan integritas aparatur pemerintahan guna memberikan pelayanan prima. Misi tersebut merumuskan Tujuan, Sasaran, Indikator sasaran/arah kebijakan, strategi program, indikator kinerja program (outcome).

MISI 3	TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR
Meningkatkan etos kerja dan integritas aparatur pemerintahan guna memberikan pelayanan prima	Meningkatkan Kapasitas Tata kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Reformasi Birokrasi	1. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan 2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah/ IPKD

Tabel 17. Penjabaran Visi Misi dalam RPJMD

Penjabaran visi misi tersebut menjadi pedoman pada saat dirumuskan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Badan Keuangan Tahun 2021-2026 dimana indikator sasaran RPJMD menjadi tujuan Rencana Strategis Badan Keuangan yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dijabarkan ke tabel berikut :

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah/ IPKD	Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah
	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase PAD terhadap APBD
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan, Kategori Tertib
	Meningkatnya kualitas Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Kategori Tertib

Tabel 18. Tujuan dan Sasaran Renstra

3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA

Visi dan Misi Kementerian Keuangan seperti tertuang dalam Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 yaitu : "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan untuk Mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

Misi Kementerian Keuangan yaitu Kementerian Keuangan melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2 (Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing) dan nomor 3 (Pembangunan yang merata dan berkeadilan), dengan upaya :

1. Menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan.
2. Mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif.
3. Memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif.
4. Mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum.
5. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi.

Visi Misi tersebut sejalan dengan sasaran Renstra BPKAD Propinsi Jawa Timur yaitu Meningkatkan kualitas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur dan Meningkatkan kualitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota se Jawa Timur maka dirumuskan beberapa yang menjadi faktor penghambat maupun faktor pendukung atas pelayanan OPD kepada masyarakat sebagai berikut :

FAKTOR PENGHAMBAT :

1. Keterbatasan Potensi Sumber Daya Alam maupun SDM
2. Keterbatasan PAD sehinggaberdampak pada pendapatan Daerah
3. Banyaknya aset yang belum bersertifikasi, legalitas status mengakibatkan kesulitan untuk mengetahui keseluruhan jumlah aset yang dimiliki oleh daerah.
4. Terbitnya beberapa peraturan perundangan yang kurang jelas dan sulit untuk dijadikan acuan kerja
5. Informasi dana transfer dari pusat yang belum pasti dan terlambat, mengakibatkan kecenderungan berubah-ubahnya penyusunan anggaran di daerah

FAKTOR PENDORONG :

1. Adanya pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan pemerintah pusat, dana subsidi sebagai pendukung pembangunan yang ada di daerah.
2. Sarana dan Prasarana yang memadai, untuk mempermudah dan memperlancar staf Badan Keuangan dalam memberikan pelayanan.
3. Etos kerja dan Disiplin Kerja dari Staf Badan Keuangan, dengan semangat dan disiplin tinggi yang dimiliki oleh staf Badan Keuangan mendorong aktifitas lembaga dalam memberikan pelayanan yang optimal.
4. Adanya Peluang dan kesempatan staf untuk mengikuti pendidikan pelatihan formal dan pendidikan jejang karier.

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Menurut Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031, Kabupaten Ngawi termasuk dalam Wilayah Pengembangan (WP) Madiun dengan fungsi

pertanian tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, kehutanan, peternakan, pertambangan, pariwisata, pendidikan, kesehatan, dan industri. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 menegaskan perlunya komitmen terhadap Program pembangunan berkelanjutan atau SDGS (Sustainable Development Goals) yang harus diprioritaskan untuk penyusunan RPJMD dan pelaksanaan program kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah. Dalam tupoksinya Badan Keuangan Kabupaten Ngawi tidak secara langsung berkaitan dengan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup namun dapat dirumuskan Faktor pendorong dan penghambat sebagai berikut :

FAKTOR PENGHAMBAT :

1. Pengelolaan BMD yang belum optimal sehingga kesulitan pensertifikatan asset terutama saluran bawah irigasi.
2. Banyaknya aset yang belum bersertifikasi, legalitas status mengakibatkan kesulitan untuk mengetahui keseluruhan jumlah aset yang dimiliki oleh daerah.

FAKTOR PENDORONG :

1. Adanya Rencana Pengembangan Jalan Bebas Hambatan dapat mempermudah akses dan penetapan cagar budaya dapat menjadi sumber pendapatan daerah
2. Program pembangunan berkelanjutan atau SDGS (Sustainable Development Goals) dapat menjadi pertimbangan dalam prioritas alokasi pendanaan program dan kegiatan.

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau di kedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah, karena dampak yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penganggaran pemerintah daerah di masa yang akan datang. Penentuan Isu – isu strategis dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Keuangan secara keseluruhan sebagai berikut ;

1. Tuntutan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
2. Belum Optimalnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah dan perlu diupayakan terus menerus menuju Pengelolaan Keuangan dan

- Barang Milik Daerah daerah yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien, sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
3. Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM Pengelolaan Keuangan Dan Barang Milik Daerah
 4. Perubahan Regulasi berdampak pada perubahan proses Bisnis dan Evaluasi Kelembagaan
 5. Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien

Merujuk pada gambaran pelayanan Perangkat Daerah, telaahan terhadap Visi Misi Kepala Daerah, Renstra K/L dan Propinsi, Implikasi langsung atau tidak langsung dari Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, maka diidentifikasi isu strategis yang disusun berdasarkan skala prioritas yang diharapkan memberikan manfaat sebagai penghubung yang dapat mensinkronkan program prioritas Pemerintah Daerah dengan program prioritas Perangkat Daerah. Isu-isu strategis adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas penyusunan regulasi dan kebijakan teknis terkait pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah menyesuaikan dinamika regulasi dan kebijakan pusat;
2. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dibidang keuangan daerah termasuk didalamnya upaya peningkatan kapasitas SDM;
3. Pengoptimalan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah agar efektif, efisien dan akuntabel;
4. Peningkatan kualitas pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH OPD

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) s/d 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik yang terjabarkan dalam keluaran keberhasilan. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Tujuan akan mensyaratkan pada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka terealisasinya misi, sehingga sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan organisasi

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara tepat, terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam kurun waktu rencana strategis. Dengan memperhatikan VISI dan MISI RPJMD Kabupaten Ngawi 2021-2026 maka Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah ke depan harus semakin berkualitas, efektif, efisien dan akuntabel dalam rangka memberikan pelayanan publik yang prima. Tujuan dan Sasaran Badan Keuangan dirumuskan pada Tabel T-C.25;

Tujuan RPJMD : Meningkatkan Kapasitas Tata kelola Pemerintahan

Tujuan Renstra : Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)

Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP Perangkat Daerah;
2. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3. Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Meningkatnya kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Indikator sasaran :

1. Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah
2. Persentase PAD terhadap APBD
3. Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan, Kategori Tertib
4. Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), Kategori Tertib

Tabel T-C.25

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Tabel Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kondisi Awal (Tahun 2020)	Target					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Kapasitas Tata kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Prima		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (peringkat Baik)	NA	79	79	79,12	79,22	79,32	79,42
		Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase PAD terhadap APBD	NA	-	11,77%	12,05%	12,66%	13,08%	13,52%
		Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan, Kategori Tertib	97,90%	97,90%	97,90%	98,00%	98,25%	98,50%	99,00%
		Meningkatnya kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Kategori Tertib	95,01%	95,03%	95,05%	95,10%	95,15%	95,20%	95,25%
2.	Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	NA	80	80	80,25	80,50	80,75	81,00

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI DAN KEBIJAKAN OPD

Strategi dan Arah Kebijakan Strategi jangka menengah Badan Keuangan Kabupaten Ngawi diharapkan dapat menunjukkan bagaimana mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Badan Keuangan Kabupaten Ngawi secara efektif dan efisien. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Badan Keuangan Kabupaten Ngawiselanjutnya menjadi dasar perumusan program dan kegiatan, dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Strategi dan Kebijakan yang diambil dijelaskan pada Tabel T-C26:

Tabel T-C.26

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

VISI	: SEMESTA BERENCANA “Terwujudnya masyarakat Kabupaten Ngawi yang mandiri, berakhlak, makmur dan berdaya saing berbasis agropolitan dengan semangat gotong royong dalam bingkai NKRI”			
MISI 3	: Meningkatkan etos kerja dan integritas aparatur pemerintahan guna memberikan pelayanan prima			
TUJUAN		SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Kapasitas Tata kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Prima		Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Meningkatkan Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Konsistensi dokumen perencanaan dan peningkatan capaian kinerja.
		Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah	Implementasi reformasi birokrasi	Penataan dan Evaluasi Kelembagaan sebagai respon terhadap perubahan regulasi
				Penyusunan regulasi peraturan daerah Pengelolaan Keuangan
			Optimalisasi Pendapatan Daerah melalui Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Pendataan Potensi Pendapatan Daerah yang belum tergali (terdaftar)
				Pelaksanaan rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja Serta Pembiayaan

	<p>Pengembangan sistem dan prosedur serta standar operasional Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel sebagai bagian dari bentuk pelayanan prima;</p>	<p>Memastikan pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban sesuai peraturan yang berlaku</p>
		<p>Optimalisasi penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai basis data pengelolaan keuangan daerah;</p>
		<p>Meningkatkan kualitas, kapasitas sarana prasarana dan sistem teknologi informasi</p>
		<p>Peningkatan koordinasi dengan mitra kerja dan OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Ngawi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah</p>
		<p>Sosialisasi perundang-undangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah</p>
	<p>Meningkatkan profesionalisme staf Pengelolaan Keuangan Daerah di internal maupun eksternal Badan Keuangan;</p>	<p>Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur melalui pendidikan pelatihan formal atau non formal</p>
	<p>Peningkatan kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah mulai dari Perencanaan, penatausahaan, penggunaan dan pemanfaatan, penghapusan;</p>	<p>Menetapkan Regulasi Pengelolaan BMD</p>
		<p>Membangun sinergitas antara Pengelola Barang, Pengguna Barang dan Kuasa pengguna Barang serta Pengurus Barang</p>
<p>Pengembangan aplikasi terintegrasi untuk Pengelolaan Barang Milik Daerah</p>		

		<p>Sosialisasi Perencanaan Kebutuhan BMD dan memastikan RKBMD sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku</p> <p>Melaksanakan sensus atau inventarisasi Aset</p> <p>Menyusun Laporan BMD secara akurat misalnya dgn Perhitungan Penyusutan Aset secara Relevan sesuai Kebijakan Akuntansi</p> <p>Pengamanan administratif/ Legalisasi BMD (sertifikasi Aset)</p>
--	--	---

Strategi yang akan digunakan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Ngawi adalah :

- a. Meningkatkan Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah
- b. Implementasi reformasi birokrasi;
- c. Optimalisasi Pendapatan Daerah melalui Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah;
- d. Pengembangan sistem dan prosedur serta standar operasional Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel sebagai bagian dari bentuk pelayanan prima;
- e. Meningkatkan profesionalisme staf Pengelolaan Keuangan Daerah di internal maupun eksternal Badan Keuangan;
- f. Peningkatan kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah mulai dari Perencanaan, penatausahaan, penggunaan dan pemanfaatan, penghapusan;

Kebijakan ditetapkan untuk memberikan petunjuk, prinsip-prinsip dasar, rambu-rambu dan sinyal penting dalam menyusun program dan kegiatan. Untuk mewujudkan strategi yang telah ditentukan perlu ditetapkan arah kebijakanyaitu :

- a. Penataan dan Evaluasi Kelembagaan sebagai respon terhadap perubahan regulasi
- b. Penyusunan regulasi peraturan daerah Pengelolaan Keuangan
- c. Pendataan Potensi Pendapatan Daerah yang belum terdali (terdaftar)
- d. Pemutakhiran basis data Pajak dan Wajib Pajak serta melakukan update Aplikasi pengelolaan Pendapatan Daerah
- e. Pelaksanaan rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja Serta Pembiayaan
- f. Memastikan pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban sesuai peraturan yang berlaku
- g. Optimalisasi penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai basis data pengelolaan keuangan daerah
- h. Meningkatkan kualitas, kapasitas sarana prasarana dan sistem teknologi informasi
- i. Peningkatan koordinasi dengan mitra kerja dan OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Ngawi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

- j. Sosialisasi perundang-undangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- k. Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur melalui pendidikan pelatihan formal atau non formal
- l. Menetapkan Regulasi Pengelolaan BMD
- m. Membangun sinergitas antara Pengelola Barang, Pengguna Barang dan Kuasa pengguna Barang serta Pengurus Barang
- n. Pengembangan aplikasi terintegrasi untuk Pengelolaan Barang Milik Daerah
- o. Sosialisasi Perencanaan Kebutuhan BMD dan memastikan RKBMD sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- p. Melaksanakan sensus atau inventarisasi Aset
- q. Menyusun Laporan BMD secara akurat misalnya dgn Perhitungan Penyusutan Aset secara Relevan sesuai Kebijakan Akuntansi
- r. Pengamanan administratif/ Legalisasi BMD (sertifikasi Aset)

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Program Organisasi Perangkat Daerah merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran yang ditetapkan di tingkat perangkat daerah dalam menunjang pencapaian sasaran di tingkat kabupaten. Dengan telah ditetapkan tujuan, sasaran dan indikator kinerjanya serta rumusan strategi dan kebijakan yang diambil untuk lima tahun ke depan, maka dalam rangka mewujudkan tujuan Badan Keuangan Kabupaten Ngawi, perlu direncanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Adapun program dan kegiatan Badan Keuangan 5 (lima) tahun mendatang terdiri dari 4 Program, 14 Kegiatan dan 66 Sub Kegiatan, program dan kegiatan mengacu pada kewenangan daerah dan sub kegiatan adalah merupakan bentuk aktivitas dalam pelaksanaan kewenangan tersebut, seperti yang dijabarkan dalam Tabel T-C27.

Tabel T-C.27
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
BADAN KEUANGAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan																			
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.02	Urusan Keuangan				468,644,447,378.00		501,574,856,740.84										100%	970,219,304,118.84		Badan Keuangan

		5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	-	100%	47,681,911,285.00	100%	22,213,336,696.65								100%	69,895,247,981.65	Sekretariat	Badan Keuangan
		5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja OPD yang disusun tepat waktu	-	100%	94,160,000.00	100%	184,000,000.00								100%	278,160,000.00	Sekretariat	Badan Keuangan
		5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan OPD yang disusun	-	11 Dokumen	14,160,000.00	11 Dokumen	14,000,000.00									28,160,000.00		
				Jumlah dokumen penganggaran OPD yang disusun	-	4 Dokumen		4 Dokumen										-		
		5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan dokumen kinerja OPD yang disusun	-	6 Dokumen	80,000,000.00	6 Dokumen	170,000,000.00									250,000,000.00		

		5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu	-	100%	44,763,173,285.00	100%	19,368,940,696.65								100%	64,132,113,981.65	Sekretariat	Badan Keuangan	
		5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	-	28 Dokumen	44,756,416,285.00	28 Dokumen	19,361,659,496.65									64,118,075,781.65			
				Jumlah dokumen pengajuan gaji dan tunjangan ASN dan Non ASN yang disusun	-	1120 orang		1120 orang													
		5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan yang disusun	-	48 Laporan	6,757,000.00	48 Laporan	7,281,200.00									14,038,200.00			
				Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	-	2 Laporan		2 Laporan													
		5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang disiplin dalam setahun	-	100%	237,064,000.00	100%	249,600,000.00									100%	486,664,000.00	Sekretariat	Badan Keuangan
		5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang dibeli/diadakan	-	240 Meter	95,200,000.00	240 Meter	89,600,000.00										184,800,000.00	Sekretariat	Badan Keuangan

				Jumlah Pakain Batik yang dibeli/diadakan	-	80 Potong		80 Potong														
				Jumlah pakaian olah raga yang dibeli/diadakan	-	80 Stel		80 Stel														
				Jumlah sepatu olahraga yang dibeli/diadakan	-	80 Pasang		80 Pasang														
		5.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat/ Sosialisasi/Bimtek	-	150 Orang	141,864,000.00	150 Orang	160,000,000.00									301,864,000.00		Sekretariat	Badan Keuangan	
				Jumlah Diklat dan pelatihan yang diadakan	-	2 Kali		2 Kali														
		5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum dalam setahun	-	100%	502,835,000.00	100%	532,035,000.00									100%	1,034,870,000.00		Sekretariat	Badan Keuangan

		5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Surat Kabar Yang disediakan	-	5 Eksemplar	34,993,000.00	5 Eksemplar	63,035,000.00									98,028,000.00		
				Jumlah Buku Peraturan Perundang undangan yang disediakan	-	5 Buku		5 Buku										-		
		5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultansi keuar yang dihadiri/Dikuti	-	200 Kali	211,317,000.00	200 Kali	170,000,000.00									381,317,000.00		
				Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultansi dalam yang dihadiri/Dikuti	-	200 Kali		200 Kali										-		
		5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan sesuai dengan kebutuhan dalam setahun	-	100%	821,937,000.00	100%	543,761,000.00								100%	1,365,698,000.00	Sekretariat	Badan Keuangan

				Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibayar pajaknya	-	39 Unit		39 Unit													
		5.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah pemeliharaan meubelair	-	0 Kali	-	15 Kali	15,000,000.00									15,000,000.00	Sekretariat	Badan Keuangan	
		5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan kerja	-	45 Kali	29,400,000.00	45 Kali	25,000,000.00									54,400,000.00	Sekretariat	Badan Keuangan	
		5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luasan gedung kantor yang dipelihara	-	300 m2	35,000,000.00	300 m2										35,000,000.00			
		5.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luasan Sarana dan Prasarana gedung kantor yang dipelihara	-	50 m2	11,250,000.00	50 m2	100,000,000.00									111,250,000.00	Sekretariat	Badan Keuangan	
		5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Dokumen Penetapan APBD dan PAPBD yang ditetapkan tepat waktu	-	100%	416,703,012,093.00	100%	476,098,472,544.19									100%	892,801,484,637.19		Badan Keuangan

		5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Perda dan perbup APBD yang disusun	-	9 Dokumen	164,444,000.00	9 Dokumen	359,920,400.00									524,364,400.00	PAD	Badan Keuangan
				Jumlah Dokumen informasi keuangan daerah yang dapat di akses publik		1 Dokumen		1 Dokumen										-		
				Jumlah Koordinasi Dengan SKPD				4 Kali										-		
				Jumlah Pemeliharaan Aplikasi yang dilaksanakan				3 Kali										-		
		5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Koordinasi Penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran yang dilaksanakan	-	4 Kali	248,241,000.00	4 Kali	56,092,000.00									304,333,000.00	PAD	Badan Keuangan

		5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun tepat waktu dan Sesuai SAP	-	100%	692,987,000.00	100%	945,275,000.00								100%	1,638,262,000.00	AKLAP	Beda n Keua ngan
		5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah koordinasi akuntansi Penerimaan Kas Daerah yang dilaksanakan	-	168 Kali	71,326,000.00	168 Kali	121,955,000.00									193,281,000.00	AKLAP	Beda n Keua ngan
				Jumlah koordinasi akuntansi Pengeluaran Kas Daerah yang dilaksanakan	-	564 Kali		564 Kali										-		
				Jumlah Verifikasi dan Pengujian atas Bukti Memorial yang dilakukan	-	14000 Kali		14000 Kali										-		
		5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja Serta Pembiayaan yang dilaksanakan	-	612 Kali	85,190,000.00	612 Kali	122,670,000.00									207,860,000.00	AKLAP	Beda n Keua ngan

		5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Daerah dan RanperbupTentans Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab yang disusun	-	9 Dokumen	147,744,000.00	9 Dokumen	169,302,000.00									317,046,000.00	AKLAP	Badan Keuangan
		5.02.02.2.03.08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun	-	2 Dokumen	74,832,000.00	2 Dokumen	44,776,000.00									119,608,000.00	AKLAP	Badan Keuangan
		5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah yang disusun	-	5 Dokumen	80,962,000.00	5 Dokumen	109,758,000.00									190,720,000.00	AKLAP	Badan Keuangan

	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah, Kategori Tertib	-	85%	1,125,686,000.00	90%	1,065,838,500.00								100%	2,191,524,500.00	BMD	Badan Keuangan
		5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Laporan/ Dokumen Barang Milik Daerah yang disusun dan disampaikan tepat waktu	-	85%	1,125,686,000.00	90%	1,065,838,500.00								100%	2,191,524,500.00	BMD	Badan Keuangan
		5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah SKPD yang menyampaikan usulan SSH															BMD	Badan Keuangan
				Jumlah Koordinasi Dengan SKPD																
		5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah SKPD yang menyampaikan RKBMD	-	47 SKPD	162,770,000.00	47 SKPD	184,800,000									347,570,000.00	BMD	Badan Keuangan

			Jumlah Publikasi yang dilaksanakan untuk Transparansi dan Partisipasi Publik	3 Kali	3 Kali																	
			Jumlah Koordinasi Dengan SKPD		6 Kali																	
	5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Rekonsiliasi BMD yang dilaksanakan	4 Kali	88,128,000.00	4 Kali	119,160,000													207,288,000.00	BMD	Beda n Keua n gan
			Jumlah Rekonsiliasi Inventarisasi Aset tahunan yang dilaksanakan	4 Kali		4 Kali																
			Jumlah Dokumen Nilai Aset yang disusun	5 Dokumen		5 Dokumen																
			Jumlah Koordinasi Dengan SKPD			6 Kali																
	5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Rekonsiliasi Inventarisasi Aset tahunan yang dilaksanakan	4 Kali	-	4 Kali															BMD	Beda n Keua n gan

		5.02.04.2.01.01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Fasilitasi dan koordinasi kegiatan Perencanaan Pendapatan	-	10 kali	320,500,000.00	10 kali	70,930,000.00									391,430,000.00	P3EPD	Badan Keuangan
				Jumlah pendampingan Aplikasi PBB dan BPHTB yang di laksanakan	-	2 kali		2 kali										-		
		5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Peserta Bimtek Pengelolaan Pajak yang diselenggarakan	-	35 orang (1x35)	198,920,000.00	35 orang (1x35)	72,332,000.00									271,252,000.00	P3EPD	Badan Keuangan
				jumlah koordinasi tentang pengembangan daerah yang dilaksanakan	-	3 kali		3 kali										-		
		5.02.04.2.01.05	Penyuluhan dan penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah yang dilaksanakan	-	12 laporan	126,480,000.00	12 laporan	84,960,000.00									211,440,000.00	P3EPD	Badan Keuangan

		5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja OPD yang disusun tepat waktu					100%	163,741,500.00	100%	171,650,000.00	100%	201,792,427.00	100%	256,500,000.00	100%	793,683,927.00	Sekretariat	Badan Keuangan
		5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					11 Dokumen	22,392,000.00	11 Dokumen	23,500,000.00	11 Dokumen	24,000,000.00	11 Dokumen	24,500,000.00	44 Dokumen	94,392,000.00	Sekretariat	Badan Keuangan
		5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD					2 Dokumen	9,400,000.00	2 Dokumen	15,000,000.00	2 Dokumen	11,792,427.00	2 Dokumen	75,000,000.00	8 Dokumen	111,192,427.00	Sekretariat	Badan Keuangan
		5.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD					4 Dokumen	6,000,000.00	4 Dokumen	6,500,000.00	4 Dokumen	6,000,000.00	4 Dokumen	7,500,000.00	16 Dokumen	26,000,000.00	Sekretariat	Badan Keuangan

		5.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA - SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA - SKPD					2 Dokumen	7,360,000.00	2 Dokumen	7,650,000.00	2 Dokumen	55,000,000.00	2 Dokumen	8,500,000.00	8 Dokumen	78,510,000.00	Sekretariat	Badan Keuangan
		5.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD					4 Dokumen	5,162,500.00	4 Dokumen	5,500,000.00	4 Dokumen	5,000,000.00	4 Dokumen	6,000,000.00	16 Dokumen	21,662,500.00	Sekretariat	Badan Keuangan
		5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					6 Laporan	113,427,000.00	6 Laporan	113,500,000.00	6 Laporan	100,000,000.00	6 Laporan	135,000,000.00	24 Laporan	461,927,000.00	Sekretariat	Badan Keuangan
		5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu					100%	19,562,213,658.00	100%	19,688,330,320.66	100%	19,800,003,697.25	100%	19,920,678,840.91	100%	78,971,226,516.82	Sekretariat	Badan Keuangan

		5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN					1120 orang	19,555,276,658.00	1120 orang	19,680,829,420.66	1120 orang	19,792,003,697.25	1120 orang	19,912,678,840.91	4480 Orang	78,940,788,616.82	Sekretariat	Badan Keuangan
				Jumlah dokumen pengajuan gaji dan tunjangan ASN dan Non ASN yang disusun					28 Dokumen		28 Dokumen		28 Dokumen		28 Dokumen		112 Dokumen	-		
		5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / semesteran SKPD dan laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / semesteran SKPD					48 Laporan	6,937,000.00	48 Laporan	7,500,900.00	48 Laporan	8,000,000.00	48 Laporan	8,000,000.00	192 Laporan	30,437,900.00	Sekretariat	Badan Keuangan
		5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang disiplin dalam setahun					100%	386,362,500.00	100%	393,100,000.00	100%	391,298,000.00	100%	412,800,000.00	100%	1,583,560,500.00	Sekretariat	Badan Keuangan
		5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					3 Paket	83,280,000.00	3 Paket	90,000,000.00	3 Paket	88,148,000.00	3 Paket	89,600,000.00	12 Paket	351,028,000.00	Sekretariat	Badan Keuangan

		5.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					150 Orang	303,082,500.00	150 Orang	303,100,000.00	150 Orang	303,150,000.00	150 Orang	323,200,000.00	600 Orang	1,232,532,500.00	Sekretariat	Badan Keuangan
		5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum dalam setahun					100%	639,841,360.00	100%	642,000,000.00	100%	712,750,000.00	100%	725,500,000.00	100%	2,720,091,360.00	Sekretariat	Badan Keuangan
		5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan					1 Paket	10,783,360.00	1 Paket	11,000,000.00	1 Paket	11,500,000.00	1 Paket	15,000,000.00	4 Paket	48,283,360.00	Sekretariat	Badan Keuangan
		5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan					1 Paket	182,475,000.00	1 Paket	183,000,000.00	1 Paket	183,250,000.00	1 Paket	183,500,000.00	4 Paket	732,225,000.00	Sekretariat	Badan Keuangan
		5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan					3 Paket	14,137,000.00	3 Paket	14,500,000.00	3 Paket	14,750,000.00	3 Paket	15,000,000.00	12 Paket	58,387,000.00	Sekretariat	Badan Keuangan

		5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan					10 Paket	115,210,000.00	10 Paket	115,500,000.00	10 Paket	115,750,000.00	10 Paket	116,000,000.00	40 Paket	462,460,000.00	Sekretariat	Badan Keuangan
				Jumlah barang yang digandakan					50000 Lembar		50000 Lembar		50000 Lembar	50000 Lembar			20000 Lembar			
		5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan					5 Dokumen	126,211,000.00	5 Dokumen	126,500,000.00	5 Dokumen	126,750,000.00	5 Dokumen	127,000,000.00	20 Dokumen	506,461,000.00	Sekretariat	Badan Keuangan
		5.02.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu					24 Laporan	10,300,000.00	24 Laporan	10,500,000.00	24 Laporan	10,750,000.00	24 Laporan	11,000,000.00	96 Laporan	42,550,000.00	Sekretariat	Badan Keuangan
				Jumlah Mamin Kunjungan Tamu yang disediakan					2000 Kotak		2000 Kotak		2000 Kotak	2000 Kotak			8000 Kotak			
		5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					200 Laporan	180,725,000.00	200 Laporan	181,000,000.00	200 Laporan	250,000,000.00	200 Laporan	258,000,000.00	800 Laporan	869,725,000.00	Sekretariat	Badan Keuangan

				Jumlah Mamin Rapat SKPD yang disediakan					500 Kotak		500 Kotak		500 Kotak		500 Kotak		2000 Kotak				
		5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan sesuai dengan kebutuhan dalam setahun					100%	1,138,297,97 0.00	100%	360,330,000. 00	100%	360,580,000. 00	100%	366,740,500. 00	100%	2,225,948,470. 00	Sekretariat	Badan Keuangan	
		5.02.01.2.07. 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan					2 Unit	472,468,000. 00	2 Unit		2 Unit		2 Unit		8 Unit	472,468,000.0 0	Sekretariat	Badan Keuangan	
		5.02.01.2.07. 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan					1 Unit	313,761,000. 00	1 Unit		1 Unit		1 Unit		4 Unit	313,761,000.0 0	Sekretariat	Badan Keuangan	
		5.02.01.2.07. 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket mebel yang disediakan					7 Unit	25,883,000.0 0	7 Unit	34,080,000.0 0	7 Unit	34,080,000.0 0	7 Unit	35,040,500.0 0	28 Unit	129,083,500.0 0	Sekretariat	Badan Keuangan	

				Jumlah Iklan / Publikasi Media Cetak dan Elektronik						Kali		Kali		Kali		Kali		Kali				
		5.02.01.2.08. 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan						36 Lapora n	59,400,000.0 0	36 Laporan		36 Lapora n		36 Lapora n		144 Lapor an		-	Sekreta riat	Bada n Keua ngan
		5.02.01.2.08. 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang di sedikan						12 Lapora n	615,515,000. 00	12 Laporan	615,600,000. 00	12 Lapora n	615,750,000. 00	12 Lapora n	615,850,000. 00	48 Lapor an	2,462,715,000. 00		Sekreta riat	Bada n Keua ngan
		5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara dalam setahun						100%	277,970,000. 00	100%	199,000,000. 00	100%	199,000,000. 00	100%	195,000,000. 00	100%	870,970,000.0 0		Sekret ariat	Bada n Keua ngan

		5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan yang dipelihara dan Dibayarkan pajaknya					1 Unit	62,000,000.00	1 Unit	55,000,000.00	1 Unit	55,000,000.00	1 Unit	80,000,000.00	4 Unit	252,000,000.00	Sekretariat	Badan Keuangan
		5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan Perizinanya					44 Unit	68,900,000.00	44 Unit/Tahun	79,000,000.00	44 Unit/Tahun	79,000,000.00	44 Unit/Tahun	55,000,000.00	176 Unit/Tahun	281,900,000.00	Sekretariat	Badan Keuangan
		5.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara					15 Unit	15,000,000.00	15 Kali	15,000,000.00	15 Kali	15,000,000.00	15 Kali	15,000,000.00	60 Kali	60,000,000.00	Sekretariat	Badan Keuangan
		5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara					47 Unit	32,070,000.00	47 Kali	50,000,000.00	47 Kali	50,000,000.00	47 Kali	45,000,000.00	188 Kali	177,070,000.00	Sekretariat	Badan Keuangan
		5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara / di rehabilitasi					4 Unit	100,000,000.00	4 Unit		4 Unit		4 Unit		16 Unit	100,000,000.00	Sekretariat	Badan Keuangan

		5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Dokumen Penetapan APBD dan PAPBD yang ditetapkan tepat waktu					100%	441,893,123,915.00	100%	508,275,766,221.00	100%	517,359,875,175.42	100%	526,454,696,321.15	100%	1,993,983,461,632.57		Bada n Keuan gan
				Persentase kepatuhan realisasi anggaran SKPD					100%		100%		100%		100%					
				Persentase Dokumen Penetapan Pertanggungjawaban APBD yang ditetapkan tepat waktu					100%		100%		100%		100%					
		5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran yang disusun Tepat Waktu					100%	999,965,500.00	100%	1,111,648,981.00	100%	1,346,648,800.00	100%	1,445,648,900.00	100%	4,904,912,181.00	PAD	Bada n Keuan gan

		5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun					94 Dokumen	99,351,000.00	94 Dokumen	155,351,000.00	94 Dokumen	156,514,000.00	94 Dokumen	155,963,000.00	564 Dokumen	567,179,000.00	PAD	Badan Keuangan
				Jumlah Koordinasi Dengan SKPD					4 Kali		4 Kali		4 Kali		4 Kali		16 Kali			
		5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan PPAS yang disusun					94 Dokumen	99,084,000.00	94 Dokumen	235,886,981.00	94 Dokumen	159,981,400.00	94 Dokumen	159,981,500.00	470 Dokumen	654,933,881.00	PAD	Badan Keuangan
				Jumlah Koordinasi Dengan SKPD					4 Kali		4 Kali		4 Kali		4 Kali		16 Kali			
		5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA SKPD yang diverifikasi					92 Dokumen	20,550,000.00	92 Dokumen	98,500,000.00	92 Dokumen	-	92 Dokumen	-	368 Dokumen	20,550,000.00	PAD	Badan Keuangan
				Jumlah Koordinasi Dengan SKPD					6 Kali		6 Kali		6 Kali		6 Kali		24 Kali			
		5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD yang Diverifikasi					92 Dokumen	31,700,000.00	92 Dokumen	125,700,000.00	92 Dokumen	-	92 Dokumen	-	368 Dokumen	31,700,000.00	PAD	Badan Keuangan

				Jumlah Koordinasi Dengan SKPD					6 Kali		6 Kali		6 Kali		6 Kali		24 Kali			
		5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD					2 Dokumen	495,246,500.00	2 Dokumen	220,246,000.00	2 Dokumen	384,685,500.00	2 Dokumen	485,237,500.00	8 Dokumen	1,585,415,500.00	PAD	Badan Keuangan
				Jumlah Dokumen informasi keuangan daerah yang dapat diakses publik					1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		4 Dokumen			
				Jumlah Koordinasi Dengan SKPD					6 Kali		6 Kali		6 Kali		6 Kali		24 Kali			
		5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD					9 Dokumen	222,863,500.00	9 Dokumen	245,465,000.00	9 Dokumen	466,157,900.00	9 Dokumen	466,157,400.00	36 Dokumen	1,400,643,800.00	PAD	Badan Keuangan

				Jumlah Dokumen informasi keuangan daerah yang dapat diakses publik					1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		4 Dokumen			
				Jumlah Koordinasi Dengan SKPD					4 Kali		4 Kali		4 Kali		4 Kali		16 Kali			
		5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang anggaran					2 Dokumen	31,170,500.00	2 Dokumen	30,500,000.00	2 Dokumen	179,310,000.00	2 Dokumen	179,309,500.00	8 Dokumen	420,290,000.00	PAD	Badan Keuangan
				Jumlah Koordinasi Penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran yang dilaksanakan					2 Kali		2 Kali		2 Kali		2 Kali		8 Kali			
		5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Laporan/ Dokumen Pengelolaan Perbendaharaan yang disusun dan disampaikan tepat waktu					92%	829,229,500.00	93%	851,229,500.00	94%	986,229,500.00	94%	1,086,229,500.00	94%	3,752,918,000.00	Perbendaharaan	Badan Keuangan

		5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah					264 Laporan	153,213,500	264 Laporan	158,478,000	264 Laporan	179,295,500	264 Laporan	192,299,500	1200 Laporan	683,286,500.00	Perbendaharaan	Badan Keuangan
				Persentase SILPA terhadap APBD					0.70%		0.70%		0.70%		0.70%		1.00%			
		5.02.02.2.02.02	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun Sebelumnya					1 Laporan	5,580,000	1 Laporan	5,580,000	1 Laporan	5,580,000	1 Laporan	7,580,000	4 Laporan	24,320,000.00	Perbendaharaan	Badan Keuangan
				Persentase SILPA terhadap APBD					6.70%		6.70%		6.70%		6.70%		10%			
		5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD					28184 Dokumen	385,478,000	15000 Dokumen	397,398,500	15300 Dokumen	572,735,000	15500 Dokumen	642,735,000	73984 Dokumen	1,998,346,500.00	Perbendaharaan	Badan Keuangan

		5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Tranfer lainnya					42 Dokumen	22,857,000	42 Dokumen	62,355,000	42 Dokumen	67,816,000	42 Dokumen	67,816,000	168 Dokumen	220,844,000.00	Perencanaan	Badan Keuangan
		5.02.02.2.02.06	Koordinasi Pelaksanaan Kerja sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Kerja sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan bukan Bank					4 Dokumen	3,022,500	4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		16 Dokumen	3,022,500.00		

		5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pe motongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan laporan hasil Koordinasi dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas daerah, Laporan Aliran Kas dan pelaksanaan Pemungutan / Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)					478 Laporan	83,813,000	478 Laporan	195,014,000	478 Laporan	107,432,000	478 Laporan	137,428,000	1912 Laporan	523,687,000.00	Perbendaharaan	Badan Keuangan
--	--	-----------------	---	--	--	--	--	--	-------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------	----------------	----------------	----------------

		5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen hasil rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi terkait					270 Dokumen	28,579,000	270 Dokumen	32,404,000	270 Dokumen	53,371,000	270 Dokumen	38,371,000	1080 Dokumen	152,725,000.00	Perbendaharaan	Badan Keuangan
		5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota					188 Orang	146,686,500	188 Orang		188 Orang		188 Orang		752 Orang	146,686,500.00		
		5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disurus tepat waktu dan Sesuai SAP					100%	984,475,000.00	100%	945,275,000.00	100%	1,084,470,000.00	100%	1,184,470,000.00	100%	4,198,690,000.00	AKLAP	Badan Keuangan

		5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah					144 Laporan	108,430,000.00	144 Laporan	121,955,000.00	144 Laporan	142,955,000.00	144 Laporan	142,955,000.00	576 Laporan	516,295,000.00	AKLA P	Badan Keuangan
				Jumlah Verifikasi dan Pengujian atas Bukti Memorial yang dilakukan					16000 Kali		16000 Kali		16000 Kali		16000 Kali		64000 Kali			
		5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen hasil rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan - LO, dan Beban					732 Dokumen	125,222,000.00	732 Dokumen	122,670,000.00	732 Dokumen	126,943,000.00	732 Dokumen	126,943,000.00	2928 Dokumen	501,778,000.00	AKLA P	Badan Keuangan
		5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran yang disusun					18 Kali	127,518,000.00	18 Kali	140,620,000.00	18 Kali	168,620,000.00	18 Kali	228,620,000.00	72 Kali	665,378,000.00	AKLA P	Badan Keuangan

		5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terkonsolidasi					134 Dokumen	39,550,000.00	134 Dokumen			134 Dokumen		134 Dokumen		536 Dokumen	39,550,000.00		
				Persentase Program Kegiatan yang tidak terlaksana					10.00%		10.00%			10.00%		10.00%		40%			
				Persentase Deviasi Realisasi Belanja Terhadap Belanja Total Dalam APBD					1%		1%			1%		1%		4%			
				Rasio Anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun Sebelumnya					0.1%		0.1%			0.1%		0.1%		0.4%			
				Jumlah Publikasi yang dilaksanakan untuk Transparansi dan Partisipasi Publik					2 Kali		2 Kali			2 Kali		2 Kali		6 Kali			
				Jumlah Dokumen yang dapat diakses publik thd informasi keuangan Daerah					1Dokumen		1Dokumen			1Dokumen		1Dokumen		4 Dokumen			

		5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten / Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten / Kota					9 Dokumen	159,438,000.00	9 Dokumen	169,302,000.00	9 Dokumen	205,000,000.00	9 Dokumen	205,000,000.00	36 Dokumen	738,740,000.00	AKLAP	Badan Keuangan
		5.02.02.2.03.08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD					2 Dokumen	107,014,000.00	2 Dokumen	44,776,000.00	2 Dokumen	75,000,000.00	2 Dokumen	75,000,000.00	8 Dokumen	301,790,000.00	AKLAP	Badan Keuangan
		5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah					5 Dokumen	171,339,000.00	5 Dokumen	109,758,000.00	5 Dokumen	119,758,000.00	5 Dokumen	119,758,000.00	20 Dokumen	520,613,000.00	AKLAP	Badan Keuangan

		5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten / Kota					60 Orang	145,964,000.00	60 Orang	236,194,000.00	60 Orang	246,194,000.00	60 Orang	286,194,000.00	240 orang	914,546,000.00	AKLAP	Beda n Keua n gan
		5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Prosentase Pelaksanaan Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam setahun					100%	438,776,688,415.00	100%	505,310,612,740.00	100%	513,885,526,875.42	100%	522,680,347,921.15	100%	1,980,653,175,951.57		
		5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan					852 Laporan	422,540,805,600.00	852 Laporan	483,788,389,740.00	852 Laporan	491,598,924,475.42	852 Laporan	499,569,549,767.15	3408 Laporan	1,897,497,669,582.57	PAD	Bada n Keua n gan
				persentase belanja urusan pemerintahan umum (dikurangi transfer Expenditures)					1%		1%		1%		1%		4%			
		5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak					10 Laporan	6,834,247,670.00	10 Laporan	11,411,630,000.00	10 Laporan	11,411,630,000.00	10 Laporan	11,411,630,000.00	40 Laporan	41,069,137,670.00	PAD	Bada n Keua n gan

				Jumlah SP2D yang diterbitkan					10 Dokumen		10 Dokumen		10 Dokumen		10 Dokumen		40 Dokumen				
	5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten / Kota						10 Laporan	9,401,635,145.00	10 Laporan	10,110,593,000.00	10 Laporan	10,874,972,400.00	10 Laporan	11,699,168,154.00	40 Laporan	42,086,368,699.00	PAD	Badan Keuangan	
			Jumlah SP2D yang diterbitkan						10 Dokumen		10 Dokumen		10 Dokumen		10 Dokumen		40 Dokumen				
			Persentase Jumlah Bagi Hasil Kabupaten / Kota dan Desa yang dikelola						100%		100%		100%		100%		100%				
	5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah dalam setahun						100%	302,765,500.00	100%	57,000,000.00	100%	57,000,000.00	100%	57,000,000.00	100%	473,765,500.00	PAD	Badan Keuangan	

		5.02.02.2.05.02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah						1 Dokumen	241,765,500.00	1 Dokumen	57,000,000.00	1 Dokumen	57,000,000.00	1 Dokumen	57,000,000.00	4 Kali	412,765,500.00	Sekretariat	Badan Keuangan
		5.02.02.2.05.03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota						92 Orang	61,000,000.00	92 Orang		92 Orang		92 Orang		368 orang	61,000,000.00		
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase BMD yang terdata dan layak						91%	1,100,838,500.00	92%	1,065,838,500.00	95%	1,200,838,500.00	100%	1,300,838,500.00	100%	4,668,354,000.00	BMD	Badan Keuangan
		5.02.03.2.01.	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Laporan/ Dokumen Barang Milik Daerah yang disusun dan disampaikan tepat waktu						100%	1,100,838,500.00	100%	1,065,838,500.00	100%	1,200,838,500.00	100%	1,300,838,500.00	-	4,668,354,000.00		

		5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standart Harga yang disusun						1 Dokumen	159,053,000.00	1 Dokumen	132,000,000.00	1 Dokumen	125,000,000.00	1 Dokumen	139,000,000.00	4 Dokumen	555,053,000.00	BMD	Badan Keuangan
				Jumlah SKPD yang menyampaikan usulan SSH						47 SKPD		47 SKPD		47 SKPD		47 SKPD		188 SKPD			
				Jumlah Koordinasi Dengan SKPD						6 Kali		6 Kali		6 Kali		6 Kali		24 Kali			
		5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah						47 Dokumen	51,480,500	47 Dokumen	52,816,395	47 Dokumen	55,000,000	47 Dokumen	68,404,600	188 Dokumen	227,701,495.00	BMD	Badan Keuangan
				Jumlah SKPD yang menyampaikan RKBMD						47 SKPD		47 SKPD		47 SKPD		47 SKPD		188 SKPD			
				Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Pengelolaan BMD yang dilaksanakan						47 orang		47 orang		47 orang		47 orang		188 Orang			
				Jumlah Koordinasi Dengan SKPD						6 Kali		6 Kali		6 Kali		6 Kali		24 Kali			
		5.02.03.2.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah						1 Dokumen	96,162,000	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		4 Dokumen	96,162,000.00		

		5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah						1 Laporan	175,148,500	1 Laporan	148,979,874	1 Laporan	180,515,874	1 Laporan	178,000,000	4 Laporan	682,644,248.00	BMD	Badan Keuangan
		5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah						5 Laporan	46,162,000	5 Laporan		5 Laporan		5 Laporan		16 Laporan	46,162,000.00		
		5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah						4 Laporan	241,514,500	4 Laporan	266,885,960	4 Laporan	300,689,961	4 Laporan	325,000,000	16 Laporan	1,134,090,421.00	BMD	Badan Keuangan
				Jumlah Dokumen asli Kepemilikan BMD yang disimpan						2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		8 Dokumen			
				Jumlah Koordinasi Dengan SKPD						6 Kali		6 Kali		6 Kali		6 Kali		24 Kali			
		5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah						5 Dokumen	105,179,000	5 Dokumen	245,995,526	5 Dokumen	277,378,922	5 Dokumen	300,000,000	20 Dokumen	928,553,448.00	BMD	Badan Keuangan

				Jumlah Publikasi yang dilaksanakan untuk Transparansi dan Partisipasi Publik						3 Kali			3 Kali			3 Kali			12 Kali				
				Jumlah Koordinasi Dengan SKPD						6 Kali			6 Kali			6 Kali			24 Kali				
		5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi Dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah						4 Laporan	55,361,500		4 Laporan		28,000,000	4 Laporan	45,000,000		16 Laporan	128,361,500.00	BMD	Badan Keuangan	
				Jumlah Koordinasi Dengan SKPD						6 Kali			6 Kali			6 Kali			24 Kali				
		5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun						47 Laporan	52,408,500		47 Laporan	119,160,745	47 Laporan	134,253,743	47 Laporan	145,433,900		188 Laporan	451,256,888.00	BMD	Badan Keuangan
				Jumlah Koordinasi Dengan SKPD						6 Kali			6 Kali			6 Kali			24 Kali				

		5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota					47 orang	118,369,000.00	47 orang	100,000,000.00	47 orang	100,000,000.00	47 orang	100,000,000.00	188 Orang	418,369,000.00	BMD	Badan Keuangan
				Jumlah SKPD yang Menindaklanjuti Hasil Pembinaan yang dilaksanakan					47 SKPD		47 SKPD		47 SKPD		47 SKPD		188 SKPD			
		5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah					100%	2,267,209,000.00	100%	2,032,068,500.00	100%	2,444,146,500.00	100%	2,910,069,000.00	100%	9,653,493,000.00		Badan Keuangan
		5.02.04.2.01.	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pendapatan yang dilaksanakan					100%	2,267,209,000.00	100%	2,032,068,500.00	100%	2,444,146,500.00	100%	2,910,069,000.00	100%			
		5.02.04.2.01.01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah					8 Dokumen	93,748,000.00	8 Dokumen	73,748,000.00	8 Dokumen	77,785,000.00	8 Dokumen	108,145,000.00	32 Dokumen	353,426,000.00	P3EPD	Badan Keuangan
				Jumlah Fasilitasi dan koordinasi kegiatan Perencanaan Pendapatan					10 Kali		10 Kali		10 Kali		10 Kali		40 Kali			

				Jumlah pendampingan Aplikasi PBB dan BPHTB yang di laksanakan					2 Kali		2 Kali		2 Kali		2 Kali		8 Kali				
		5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah					3 Dokumen	89,873,000.00	3 Dokumen	52,873,000.00	3 Dokumen	73,695,000.00	3 Dokumen	86,715,000.00	12 Dokumen	303,156,000.00	P3EPD	Beda n Keua ngan	
				Jumlah Peserta Bimtek Pengelolaan Pajak yang diselenggarakan					35 Orang		35 Orang		35 Orang		35 Orang		140 orang				
		5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah					12 laporan	20,338,000.00	12 laporan	19,577,500.00	12 laporan	90,950,000.00	12 laporan	117,070,000.00	48 Laporan	247,935,500.00	P3EPD	Bada n Keua ngan	

				Jumlah Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah yang dilaksanakan untuk Transparansi dan Partisipasi Publik					12 Kali		12 Kali		12 Kali		12 Kali		48 Kali			
		5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah					500 Laporan	1,031,411,000.00	500 Laporan	931,411,000.00	500 Laporan	1,096,735,000.00	500 Laporan	1,127,235,000.00	2000 Laporan	4,186,792,000.00	P3EPD	Badan Keuangan
		5.02.04.2.01.06	Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah					12 Laporan	10,765,000.00	12 Laporan	12,340,000.00	12 Laporan	31,060,000.00	12 Laporan	31,060,000.00	48 Laporan	85,225,000.00	P3EPD	Badan Keuangan
				Jumlah aplikasi pajak daerah yang dipelihara					2 Aplikasi		2 Aplikasi		2 Aplikasi	2 Aplikasi	2 Aplikasi		8 Aplikasi			
		5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah					1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		4 Dokumen			

	5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak daerah					40 Layanan	34,867,000.00	40 Layanan	33,990,000.00	40 Layanan	37,990,000.00	40 Layanan	37,990,000.00	160 Layanan	144,837,000.00	PJEPD	Badan Keuangan
	5.02.04.2.1.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah dilakukan Penelitian dan Verifikasi					7 Dokumen	96,635,000	7 Dokumen	96,635,000	7 Dokumen	110,437,500	7 Dokumen	181,437,500	28 Dokumen	485,145,000.00	PPD	Badan Keuangan
			Persentase Deviasi realisasi PAD thd anggaran PAD dalam APBD yang disusun tepat waktu					0.80%		0.80%		0.80%		0.80%		3.20%			
	5.02.04.2.1.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah					240 Dokumen	179,706,000	240 Dokumen	145,000,000	240 Dokumen	220,000,000	240 Dokumen	365,000,000	960 Dokumen	909,706,000.00	PPD	Badan Keuangan
	5.02.04.2.1.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah					8 Dokumen	709,866,000	8 Dokumen	666,494,000	8 Dokumen	705,494,000	8 Dokumen	855,416,500	32 Dokumen	2,937,270,500.00	PPD	Badan Keuangan
			Jumlah Dokumen Realisasi PBB yang di Publikasikan di Wabsite					1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		4 Dokumen			
			Jumlah Publikasi yang dilaksanakan untuk Transparasi dan Partisipasi Publik					1kali		1kali		1kali		1kali		4 Kali			

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, atau bisa juga diartikan suatu variabel yang digunakan untuk mengekspresikan secara kuantitatif efektivitas dan efisiensi proses atau operasi dengan berpedoman pada targettarget dan tujuan organisasi. Jadi jelas bahwa indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu. Indikator kinerja (performance indicator) sering disamakan dengan ukuran kinerja (performance measure). Namun sebenarnya, meskipun keduanya merupakan kriteria pengukuran kinerja, terdapat perbedaan makna. Indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja, sehingga bentuknya cenderung kualitatif. Sedangkan ukuran kinerja adalah kriteria kinerja yang mengacu pada penilaian kinerja secara langsung, sehingga bentuknya lebih bersifat kuantitatif. Indikator kinerja dan ukuran kinerja ini sangat dibutuhkan untuk menilai tingkat ketercapaian tujuan, sasaran, dan strategi, yang lentunya tetap mengacu pada rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Di bawah ini akan dikemukakan indikator kinerja Badan Keuangan Kabupaten Ngawi yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang dan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Ngawi tahun 2021-2026 dalam Tabel T-C28 :

Tabel T-C.28

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

No	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kondisi Awal (Tahun 2020)	Target Kinerja pada tahun -					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (peringkat Baik)	NA	79	79	79.12	79.22	79.32	79.42
2	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	NA	80	80	80,25	80,50	80,75	81,00
3	Persentase PAD terhadap APBD	NA	-	11,77%	12,05%	12,66%	13,08%	13,52%
4	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan, Kategori Tertib	97,90%	97,90%	97,90%	98,00%	98,25%	98,50%	99,00%
5	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Kategori Tertib	95,01%	95,03%	95,05%	95,10%	95,15%	95,20%	95,25%

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan Kabupaten Ngawi tahun 2021 - 2026 merupakan pedoman atau dasar bagi seluruh unsur yang ada di Badan Keuangan dalam mengemban tugas sebagai Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Ngawi. Di samping itu, Rencana Strategis Badan Keuangan ini dapat dijadikan sebagai sarana informasi bagi masyarakat dalam mengawal terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah secara transparan. Renstra Badan Keuangan Kabupaten Ngawi tahun 2021 - 2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) selama kurun waktu 5 tahun. Renstra Badan Keuangan juga menjadi tolok ukur dalam evaluasi kinerja dan pelaporan kinerja tahunan dan lima tahunan Badan Keuangan. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, dapat dilakukan perubahan Renstra dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan pencapaian visi misi Kabupaten Ngawi tahun 2021 - 2026 sangat tergantung dari seluruh sumber daya organisasi yang ada di dalamnya, terutama komitmen seluruh komponen Badan Keuangan Kabupaten Ngawi untuk melaksanakan Rencana Strategis tersebut dengan penuh tanggung jawab. Selain itu ditentukan pula oleh kemampuan, kesiapan, dan profesionalisme serta sikap mental Sumber Daya Aparatur. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah memberikan masukan, saran dan kritik yang bersifat konstruktif sehingga Renstra Badan Keuangan Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 menjadi lebih baik.

8.1. KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Keuangan dilaksanakan dengan memperhatikan :

- a. Rencana Strategis ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja tahunan, sebagai acuan dan upaya menjaga konsistensi antara perencanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran dengan pelaksanaan serta dokumen perencanaan;
- b. Apabila dalam perjalanannya terjadi perubahan pada Rencana Strategis (RENSTRA) yang telah ditetapkan yaitu tujuan dan sasaran 5 (lima) tahun ke

depan, maka perubahan tersebut tidak untuk mengubah tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, akan tetapi perubahan tersebut hanya dapat memperlambat atau mempercepat tercapainya tujuan dan sasaran. Implikasinya adalah memungkinkan adanya pergeseran target, tetapi masih dalam kerangka pencapaian tujuan semula.

8.2. RENCANA TINDAK LANJUT

Dengan tersusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Keuangan , maka rekomendasi rencana tindaklanjut sebagai berikut :

- a. Rencana Strategis (RENSTRA) harus dievaluasi secara periodik sebagai bahan masukan dalam penyusunan perencanaan selanjutnya.
- b. Melakukan koordinasi dan membangun komunikasi antar pegawai, antar bidang dan antar Perangkat Daerah sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan keuangan dan asset daerah;
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian target kinerja pelaksanaan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA).

BNPATI NGAWI,

ONY ANWAR HARSONO